



International
Labour
Organization

SAFETY
+
HEALTH
FOR ALL



From
the People of Japan



Mawas Diri di Tengah Pandemi

KOMPILASI NOMINASI DAN PEMENANG
KOMPETISI KARYA JURNALISTIK
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)



Mawas Diri di Tengah Pandemi

KOMPILASI NOMINASI DAN PEMENANG
KOMPETISI KARYA JURNALISTIK
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Mawas Diri di Tengah Pandemi

KOMPILASI NOMINASI DAN PEMENANG KOMPETISI KARYA
JURNALISTIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

KARYA KATEGORI CETAK/ONLINE:

Bimo Aria Fundrika, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany, Ayu
Prawitasari, Dian Muhtadiah Hamna, Hasya Nindita, Nyoman Ary
Wahyudi, Muhamad Taslim Dalma, Iwan Arifianto, Ajo Darisman dan
Nurul Nur Azizah, Dhana Kencana dan Tim

KARYA KATEGORI FOTO:

Simon Dodit Yogo Pitoyo, Prima Mulia, Aji Hendro, Arie Basuki, Anis
Efizudin, Aristono Edi Kiswanto, Dery Ridwansah, Ferganata Indra
Riatmoko, Maman Sukirman, Oky Lukmansyah

EDITOR:

Ezra Natalyn Sihite

JURI KATEGORI CETAK/ONLINE:

Ati Nurbaiti
Heru Margianto
Abdul Hakim

JURI KATEGORI FOTO:

Arbain Rambey
Adek Berry
Yuka Ujita

CETAKAN PERTAMA:

Februari 2022

DITERBITKAN OLEH:



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

Jalan Sigura Gura No.6A, Duren Tiga,

Jakarta Selatan 12760 - Indonesia Tel. +62 21 22079779

E-mail: sekretariat@ajiindonesia.or.id, Web : www.aji.or.id

DIDUKUNG OLEH :



International
Labour
Organization

SAFETY
+ HEALTH
FOR ALL



From
the People of Japan

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | 7 |
| Kata Pengantar International Labour Organization (ILO) | 9 |
| Kata Pengantar Juri Kategori Cetak/Online | 11 |
| Kata Pengantar Juri Kategori Foto | 14 |

KATEGORI CETAK/ONLINE

NOMINASI:

| | |
|---|----|
| Dari Anxiety Hingga Ingin Bunuh Diri: Potret Pekerja Teknologi Terhimpit Pandemi Bimo Aria Fundrika - <i>Suara.com</i> | 17 |
| Sopir Transjakarta, Satu Kemudi Beda Nasib Fransiskus Wisnu Wardhana Dany - <i>Harian Kompas</i> | 26 |
| Para Perempuan yang Bekerja Tanpa Pengaman Ayu Prawitasari - <i>Solopos.com</i> | 34 |
| Tidak Mengenakan Perlengkapan K3, Nekat Bertugas Demi Tercapainya Vaksinasi Dian Muhtadiah Hamna - <i>Pijarnews.com</i> | 44 |
| Antara Maut dan Doa Dalam Hidup Tukang Gali Makam Covid-19 Hasya Nindita - <i>Kompas.tv</i> | 51 |
| Ironi Industri Kelapa Sawit, Penuh Cuan Tapi Minim Jaminan bagi Buruh Nyoman Ary Wahyudi - <i>Bisnis Indonesia</i> | 60 |

| | |
|---|-----|
| Risiko Kerja Tinggi, Pentingnya Aspek Kesehatan dan Keselamatan bagi Nelayan di Sultra Muhamad Taslim Dalma - <i>Zonasultra.com</i> | 69 |
| Cerita Ardian Pasien Kanker Payudara Rasakan Manfaat Penerapan K3 saat Kebakaran Rumah Sakit Kariadi Semarang Iwan Arifianto - <i>Tribun Jateng</i> | 82 |
| Kerja Serabutan: Kondisi Perempuan dan Kelompok Miskin Jakarta Di Tengah Pandemi Ajo Darisman dan Nurul Nur Azizah - <i>Konde.co</i> | 93 |
| Kesehatan Mental: Vital dan Fatal Bikin Bebal saat Pandemi COVID-19 Dhana Kencana dan Tim - <i>IDNTimes.com</i> | 103 |

PEMENANG 1:

Dari Anxiety Hingga Ingin Bunuh Diri: Potret Pekerja Teknologi Terhimpit Pandemi
Bimo Aria Fundrika - *Suara.com*

PEMENANG 2:

Sopir Transjakarta, Satu Kemudi Beda Nasib
Fransiskus Wisnu Wardhana Dany - *Harian Kompas*

KATEGORI FOTO

NOMINASI:

Penyambungan Kabel Jaringan SUTET
Simon Dodit Yogo Pitoyo - *Suara Merdeka*

115

| | |
|---|-----|
| Meregangkan Tubuh Sejenak Prima Mulia - <i>Agence France-Presse</i> | 117 |
| Penyemprotan Disenfektan Aji Hendro - <i>Godepok</i> | 119 |
| Bekerja dengan Prokes Ketat Arie Basuki - <i>Merdeka.com</i> | 121 |
| Pemeliharaan BTS di Gunung Sumbing Anis Efizudin - <i>www.antarafoto.com</i> | 123 |
| Mawas Diri di Tengah Pandemi: Wajib Protokol Kesehatan hingga Survei Harian Aristono Edi Kiswantoro - <i>Pontianak Post</i> | 125 |
| Pekerja Kontruksi Jakarta International Stadium Dery Ridwansah - <i>Jawapos.com</i> | 127 |
| Uji Kompetensi Mengelas Ferganata Indra Riatmoko - <i>Harian Kompas</i> | 129 |
| Benahi Fasilitas Kelistrikan di Mamuju, Petugas PLN Prioritaskan Keselematan Maman Sukirman - <i>Sindonews.com</i> | 131 |
| Produksi Sapu Ekspor Oky Lukmansyah - <i>LKBN Antara</i> | 133 |

PEMENANG 1 :

Penyemprotan Disenfektan

Aji Hendro - *Godepok*

PEMENANG 2 :

Bekerja dengan Prokes Ketat

Arie Basuki - *Merdeka.com*

Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menjadi isu ke sekian dalam berbagai diskusi buruh dan para pemangku kebijakan terkait. Kalah populer dengan perdebatan soal upah buruh yang jauh dari sejahtera. Namun, kesehatan dan keselamatan pekerja menjadi isu yang relevan kembali saat buruh dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Bahkan, warga yang terinfeksi varian baru Omicron sudah mencapai lebih dari 5 juta orang menjelang akhir Februari 2022 atau tahun ketiga pandemi.

Pandemi juga membuat pola kerja buruh menjadi berubah, dari pekerjaan luar jaringan menjadi online dengan jam kerja lebih panjang. Ini kemudian membuat kesehatan mental para pekerja menjadi rentan. Sejumlah buruh melaporkan mudah cemas, marah, dan gairah kerja yang semakin berkurang.

Tidak hanya itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) juga menyebutkan telah terjadi 7.818 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari-Oktober 2021. Sebanyak 156 kasus di antaranya terjadi di tempat kerja. Ini berarti tempat kerja masih menjadi tempat yang tidak aman bagi pekerja perempuan selama pandemi.

Kondisi seperti ini jamak kita temui di masyarakat. Hampir terjadi di semua sektor, mulai dari pekerja di perusahaan digital hingga perusahaan konstruksi. Sayangnya regulasi setingkat undang-undang yang menjadi payung persoalan K3 sudah berusia cukup lama yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kendati pemerintah kemudian menutupi dengan peraturan menteri pada 2018 dan peraturan

presiden 2019. Namun, pola kerja yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja belum menjadi budaya di Indonesia.

Karena itu, AJI Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menggelar kompetisi dan penghargaan media untuk kriteria pemberitaan dan foto jurnalistik terkait isu K3. Kegiatan ini terbuka bagi jurnalis yang bekerja di berbagai pelantar media dan jurnalis lepas seluruh Indonesia di bawah tema: “Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi COVID-19”.

Harapannya penghargaan ini dapat memotivasi jurnalis di tanah air dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik terkait isu K3 yang komprehensif. Dengan demikian, isu K3 dapat menjadi perbincangan di masyarakat, dan lebih jauh dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan terkait K3.

Buku di tangan Anda ini merupakan kompilasi karya jurnalis yang masuk 10 nominasi kategori cetak atau online dan 10 nominasi kategori foto. Temanya beragam mulai dari kesehatan mental, pelaksanaan protokol kesehatan saat pandemi, hingga keselamatan pekerja perempuan.

Karya jurnalistik dalam bentuk buku ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada ILO atas kerja sama yang luar biasa dan berharap kerja sama dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

Sasmito

Ketua Umum AJI Indonesia

Kata Pengantar International Labour Organization (ILO)

Pandemi COVID-19 telah meninggalkan dampak yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja Indonesia. Saat pemerintah berjuang untuk menekan penyebaran virus dengan membatasi pelaksanaan aktivitas perekonomian, sosial dan mobilitas, serta menangani krisis kesehatan masyarakat yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial dan berdampak pada menajamnya peningkatan pengangguran dan melebarnya kesenjangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 29 juta orang usia kerja yang terkena dampak COVID-19 pada Agustus 2020, menambah kumpulan sekitar tujuh juta pencari kerja yang menghadapi kesulitan signifikan dalam mencari pekerjaan.

Bersamaan dengan upaya untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, ILO dengan konstituen tripartitnya telah mendukung berbagai program tanggap COVID-19 yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai komponen penting dari pekerjaan yang layak – yang juga merupakan prasyarat untuk membuka, melanjutkan dan memperluas bisnis. Dengan pemahaman yang dimiliki saat ini dan berdasarkan pengalaman dari dampak COVID-19 pada dunia kerja, hal ini jelas menekankan pentingnya upaya meningkatkan K3 di Indonesia guna melindungi pekerja dan memastikan kelangsungan ekonomi dan kegiatan sosial.

Membina dan mempromosikan budaya pencegahan dalam K3 merupakan dasar untuk meningkatkan kinerja K3 dalam jangka panjang – namun perlu diarusutamakan dan bersifat inklusif pada semua sektor. Prinsip dan praktik K3 sebagian besar hanya mencakup pekerja di tempat kerja formal yang tidak sebanding

dengan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal dan sektor pekerjaan lain yang sedang berkembang, seperti industri jasa, seni, hiburan, media serta pekerjaan berbasis pelantar digital baik dalam skala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kendati kesadaran terhadap K3 masih menjadi tantangan dan kerap tidak menjadi prioritas, hal ini harus berubah dan perlu ada tindakan cepat dengan pendekatan yang komprehensif.

Media dengan kemampuannya menjangkau masyarakat luas untuk menginformasikan, menafsirkan dan mendidik serta membimbing, memiliki peran kunci dalam mempromosikan budaya keselamatan dan kesehatan. Ribuan liputan berita tentang tema-tema utama terkait COVID-19 membantu masyarakat untuk lebih memahami pengelolaan risiko virus, mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi - baik untuk kebutuhan individu maupun publik serta kehidupan mereka.

Melalui kompetisi media yang diselenggarakan oleh AJI Indonesia dan proyek ILO bertajuk Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, sebuah proyek yang didanai oleh Pemerintah Jepang, kami telah mengumpulkan lebih dari 120 artikel dan 91 foto cerita bertema khusus tentang K3 dan COVID-19 yang telah dipublikasikan dalam media massa dari periode Januari 2021 hingga Januari 2022.

Kumpulan karya jurnalistik ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap dedikasi para jurnalis yang bertugas meliput pemberitaan tentang isu-isu terkait K3 di tengah pandemi secara berkualitas.

Michiko Miyamoto

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Kata Pengantar Juri Kategori Cetak/Online

K3: Bukan Sekedar Sadar Risiko Kerja

Setiap hari makanan dan cemilan banyak orang Indonesia harus termasuk gorengan – dan kita tak pernah terpikir risiko buruh perkebunan sawit, yang menyediakan bahan dasar utama di pasar minyak goreng. Kita hanya marah ketika sang minyak sulit dibeli dengan cukup murah.

Di sisi lain, sejak wabah COVID-19, kita menuntut lancarnya sambungan internet untuk bekerja, belajar dan hiburan serta bertransaksi; tanpa memikirkan pekerja teknologi informasi yang jantungan tiap kali teleponnya berbunyi setiap waktu, sampai ada yang coba bunuh diri.

Dan ketika Presiden Jokowi menyerukan target vaksinasi di seluruh negeri harus tercapai, mungkin tak terbayang tenaga kesehatan yang saling berpelukan dan menangis ketika perahu mereka diterjang ombak tinggi dalam tugasnya mencapai pulau-pulau terluar.

Juga banyak pujian terlontar pada ragam bantuan pemerintah untuk kalangan miskin dan yang kehilangan pekerjaan serta usaha kecil – tanpa mau tahu kesulitan beberapa kelompok untuk menjangkaunya. Misalnya, untuk transpuan mendapat KTP saja sulit karena mereka sudah terbuang dari keluarga. Tanpa kejelasan akses bantuan dan jaminan keamanan sehari-hari dari stigma dan rasa cemas, sulit bagi seseorang memikirkan kesehatan dan keselamatannya.

Gambaran di atas hanya sedikit contoh isi 124 karya yang diterima panel juri lomba karya tentang “Keselamatan dan Kesehatan kerja di Masa Pandemi COVID-19” yang diselenggarakan ILO dan AJI.

Walaupun banyak tulisan yang sangat baik akhirnya kami harus fokus pada tema lomba. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ikut menentukan kemampuan warga dunia untuk hidup bersama COVID-19, yang belum pasti ujungnya.

Sementara itu pandemi dengan terang benderang mengungkap jurang antara teori dan kenyataan. Misalnya, selama berpuluh tahun pun peningkatan K3 lebih tampak di sektor formal, padahal kita tahu warga Indonesia kebanyakan bergerak di sektor informal yang kurang pendokumentasian, kurang pengaturan dan karena itu lebih kurang terjangkau perlindungan. Pelecehan seksual pun umumnya masih dianggap kesialan pekerja perempuan belaka, bukan risiko kerja yang harus dicegah dan diatasi.

Dalam masa pandemi gelombang PHK pun menghasilkan lebih banyak lagi tenaga lepas bahkan dalam sektor yang dikira serba teratur. Mata wartawanlah yang dapat menggambarkan apa yang ia gali dan amati, sehingga kita bisa lebih paham kondisi sehari-hari jutaan warga yang masih terabaikan.

Di sinilah peran pers, khususnya para jurnalis yang berhasil memaparkan kondisi nyata berbagai kelompok warga negara, yang harusnya dapat mengharapkan bantuan dan perlindungan tanpa kecuali.

Buku ini hanya dapat memuat 10 karya terbaik termasuk dua pemenang yang tulisannya berjudul “Dari *Anxiety* Hingga Ingin Bunuh Diri: Potret Pekerja Teknologi Terhimpit Pandemi” serta “Sopir TransJakarta, Satu Kemudi Beda Nasib”.

Harapan kami, seluruh karya ini dapat memancing pemahaman dan empati yang lebih dalam dari sesama pers, publik dan pengambil keputusan, terhadap beberapa masalah yang

sering terlupakan dalam bahasan “K3”. Nyatanya kondisi yang memungkinkan penerapan K3 secara menyeluruh dan konsisten sering menentukan hidup dan mati terlebih dalam masa pandemi, namun tak jarang tinggal jargon di spanduk serta penghakiman kesadaran dan pemahaman pekerja yang “masih rendah.”

Akhir kata, seluruh panitia dan juri mengucapkan selamat pada pemenang Bimo Aria Fundrika dari suara.com, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany dari *Harian Kompas* serta segenap pemenang nominasi beserta para redaktornya. Semoga karya Anda menjadi inspirasi sesama jurnalis, pengambil keputusan di tingkat lokal dan tempat kerja sampai pembuat kebijakan, serta masyarakat umumnya.

Tim Juri Kategori Cetak/Online :
Ati Nurbaiti, AJI Indonesia
Heru Margianto, Kompas.com
Abdul Hakim, ILO

Kata Pengantar Juri Kategori Foto

Bekerja adalah Inti Kehidupan

Lomba foto yang diadakan International Labour Organization (ILO) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam kerangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2022 ini, di satu sisi seakan melengkapi aneka lomba foto tentang pandemi COVID-19 yang sudah ada. Tapi sebenarnya lomba foto ini punya cakupan yang sangat luas karena inti utama topik lomba ini adalah masalah kerja dan pekerjaan, bukan semata soal pandemi.

Dan di dalam sebuah suasana pekerjaan, ada hal sangat penting yaitu keselamatan. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali risiko yang ada di pekerjaan apa pun. Sementara di masa pandemi ini, keselamatan dari ketertularan virus Covid sungguh mengemuka. Maka tak bisa dipungkiri, “rasa” COVID-19 sangat mengemuka dalam hampir semua foto yang masuk ke panitia.

Dewan juri pun umumnya tidak akan meloloskan foto suasana kerja yang tidak memakai masker pada situasi kerja apa pun. Ada perkecualian memang, yaitu pada foto-foto yang dibuat dari jarak jauh misalnya pekerja pemasangan kabel tegangan tinggi. Selain bermasker atau tidak tak terlalu relevan di pekerjaan seperti ini, detail wajah pekerja pun tidak tampak karena dipotret dari jarak yang cukup jauh.

Dalam beberapa sisi, foto-foto yang adegannya sudah muncul di aneka lomba foto tentang COVID-19, umumnya tidak terlalu dilirik juri lagi untuk melaju ke babak berikutnya

agar bisa memberikan kesegaran pada lomba foto ini. Tetapi kenyataannya, adegan yang sebenarnya “biasa” tapi ternyata bisa tampil luar biasa dan segar dalam foto karena bagaimana pun momen dan cara pengambilan bisa memberi rasa baru pada sebuah adegan.

Sebagai contoh adalah adegan penjemputan jenazah korban COVID-19. Di banyak publikasi dan lomba foto, adegan ini sudah banyak muncul. Tetapi di lomba foto ILO/AJI ini tetap muncul adegan-adegan penjemputan jenazah yang masih bisa memberi kesan beratnya masa pandemi ini.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang tampak di foto-foto penjemputan jenazah korban COVID-19 tampak dari busana yang dipakai tim penjemputan, lalu sepiunya suasana lokasi, dan juga penampakan warga yang mengintip dari jendela rumah mereka.

Tantangan terberat lomba foto ini adalah, foto harus sudah dipublikasikan. Padahal, dalam sebuah publikasi, belum tentu foto yang dipublikasikan adalah foto yang “terbaik” karena sebuah publikasi selalu punya garis arah pemberitaan yang menyatukan arah tulisan dan foto yang menyertainya.

Akhir kata, lomba foto ILO/AJI ini memang sangat membantu masyarakat memahami aneka kondisi keselamatan dan kesehatan kerja secara umum. Alangkah baiknya bila di masa mendatang, lomba ini membuka juga kategori untuk masyarakat umum agar kampanye tentang segala hal dalam pekerjaan bisa makin memasyarakat.

Tim Juri Kategori Foto :
Arbain Rambey, Jurnalis Foto
Adek Berry, AFP
Yuka Ujita, ILO

**KATEGORI
CETAK/ONLINE**



Bimo Aria Fundrika

Suara.com

Saat ini bekerja sebagai jurnalis/editor untuk Suara.com. Sebagai jurnalis Bimo punya fokus dan ketertarikan terhadap isu gender, perempuan, kelompok minoritas, dan kesehatan mental. Selama menjadi jurnalis Bimo pernah meraih sejumlah penghargaan dan juga Fellowship, beberapa di antaranya Penghargaan Jurnalis Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penerima Fellowship Health And Nutrition Journalist Academy.

Mengikuti kompetisi ini kembali menyadarkan bahwa ternyata masih banyak perusahaan dan pemberi kerja yang belum punya kepedulian dan keberpihakan terhadap isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) para pekerjanya dan negara juga belum hadir untuk menegakkan aturan terkait K3 yang telah dibuat.

Dari Anxiety hingga Ingin Bunuh Diri: Potret Pekerja Teknologi Terhimpit Pandemi

Bimo Aria Fundrika (Suara.com)

Waktu di layar monitor laptop Ara telah menunjukkan pukul 22.00. Lelaki yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi itu masih belum beranjak dari depan laptopnya. Dari pukul 09.00 Ara masih terus berkutat merespons keluhan dan menjawab deretan pertanyaan dari pengguna layanan teknologi tempatnya bekerja.

“Kalau aplikasi ada problem kita mesti tangani saat saat itu juga, enggak peduli walau itu sudah malam. Enggak peduli juga malam sebelumnya ada masalah,” kata Ara.

Kerja di industri teknologi yang dijalani Ara sejak lima tahun lalu memang terkenal tidak punya waktu. Karakter teknologi yang serba cepat menuntut Ara mesti adu maraton dengan deretan keluhan yang datang beruntun tak berkesudahan.

“Enggak peduli dengan kondisi kita sebagai individualnya,” ujar Ara.

Sejak pemerintah menyatakan status pandemi Covid-19 di Indonesia, tempat Ara bekerja meminta seluruh karyawan untuk bekerja dari rumah. Ara yang tinggal di sebuah kamar indeks berukuran 3 x 3 meter terpaksa hanya bisa menghabiskan hari-

harinya di depan laptop. Tidak ada lagi istilah jam kerja. Batasan antara istirahat dan waktu bekerja juga jadi kabur. Semua waktu ia habiskan untuk bekerja dan bekerja. Tanpa bersosialisasi.

“Kondisi itu bikin saya sudah lupa sama diri sendiri. Pekerjaan itu membuat saya tidak mengenal diri saya sendiri,” kata Ara.

Pada hari-hari tertentu tidak jarang ia hanya bisa meringkuk di pojok kamar indekosnya. Air matanya tumpah. Ia menangis.

“Saya sudah mencoba *suicide* (bunuh diri) berkali-kali.”

Bahkan, ia sampai menyimpan sebilah pisau lipat di balik bantalnya. Deretan peristiwa itu membawanya untuk terapi ke psikiater. Selama proses terapi berlangsung, psikiater memberi dua jenis obat yang mesti ia habiskan selama dua minggu. Kondisi Ara tak banyak berubah. Sehingga psikiater menyarankan untuk mengambil cuti dan pergi liburan.

Ara kemudian memutuskan terbang ke Pulau Dewata dan meninggalkan seluruh pekerjaannya di Tangerang Selatan. Di sana ia menghabiskan waktu pergi ke pantai melihat deburan ombak dan embusan angin sepoi-sepoi. Kondisinya sempat membaik usai liburan.

Hingga suatu ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi *WhatsApp*. Darah di tubuhnya seolah menjaral naik ke kepala. Ia cemas dan ketakutan. Ara khawatir pesan yang masuk di ponselnya ialah perintah untuk kerja.

“Saya cuma berharap *please stop* berbunyi. Walaupun saya tahu itu bukan pekerjaan, tapi yang ada di dalam bayangan saya setiap dengar notifikasi itu adalah pekerjaan,” ungkap Ara.

Situasi itu terus berulang di hari-hari berikutnya. Sudah tidak terhitung berapa kali ia melempar ponselnya hanya karena ada notifikasi masuk.

Kondisi serupa juga sempat dialami oleh Ino yang bekerja sebagai Data Scientist di perusahaan teknologi finansial di daerah Jakarta Selatan. Jantung Ino selalu berdegup lebih cepat tiap bunyi notifikasi muncul dari ponselnya. Napasnya tersengal dan sesak. Asam lambungnya mendadak naik tiap kali ponselnya berbunyi.

Di lain waktu Ino juga merasa mual setiap kali menatap laptopnya. Ia cemas membayangkan tumpukan pekerjaan yang mesti ia rampungkan. Sejak kepala divisi di kantornya ganti, pekerjaan terus mengalir deras tiada henti. Beban kerja yang menumpuk membuat Ino tidak bisa fokus mesti menyelesaikan pekerjaan yang mana terlebih dahulu.

“Jadi hari ini bahas ini, besok bahas itu, jadi mana yang mau *difokusin*, Kalau kata orang *agile* (tangkas), tapi *agile* enggak *gini* juga, harus tahu prioritasnya,” ujar Ino.

Hal itu membuat Ino akhirnya memutuskan pergi ke profesional di bidang kesehatan mental. Belakangan ia didiagnosis dengan psikosomatis atau keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis atau mental, seperti stres, depresi, takut atau cemas.

Kelelahan Terhimpit Pandemi

Manajer Pelayanan Konseling Yayasan Pulih Danika Nurkalista mengatakan, keluhan tentang kecemasan dan kelelahan akibat kerja atau dikenal dengan *burnout* memang tampak lebih banyak selama pandemi.

“Karena *working from home* level stresnya agak beda dan *burnout*-nya dipengaruhi oleh itu. Karena waktu di rumah yang *blur* pembagian tugas yang *blur*,” kata Danika.

Danika menjelaskan bahwa meski kerja dari rumah memangkas waktu dan biaya transportasi tapi hal itu juga memunculkan konsekuensi tersendiri. Situasi pandemi, lanjut Danika, membuat banyak orang seolah sanggup mengerjakan banyak hal dan

mengikuti lebih dari satu rapat *online* di waktu yang bersamaan.

“Jadi tidak ada waktu istirahat yang reflektif untuk pekerja karena tidak ada jeda antara pekerjaan satu pekerjaan lainnya, jadi *never ending checklist*,” ujar Danika.

Awal 2020 lalu, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) juga sempat melakukan survei terhadap 84 responden yang merupakan pekerja industri media dan kreatif termasuk pekerja di sektor teknologi. Survei bertajuk ‘Sudah Seimbangkah Kerja Kita’ mencoba menggali kaitan antara kondisi kerja dan dampaknya pada kesehatan mental. Jam kerja, beban kerja, dan *deadline* menjadi kata kunci paling sering muncul ketika membicarakan tentang masalah pekerja.

Salah satu temuan dari survei tersebut yakni 40,5 persen responden bekerja selama lebih dari 8 jam dalam satu hari. Temuan tersebut sejalan dengan riset Badan Ekonomi Kreatif RI (BEKRAF) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa lebih dari sepertiga (31,98 persen) pekerja industri kreatif Indonesia *overwork* dengan bekerja lebih dari 48 jam setiap minggunya.

Padahal, waktu kerja maksimal yang diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah delapan jam dalam satu hari atau empat puluh jam dalam satu minggu.

Sementara itu, temuan lain dari survei ialah bahwa 52,4 persen responden pernah mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja baik fisik maupun mental. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa stres, lelah, cemas, dan kurang istirahat menjadi sejumlah dampak yang paling sering dialami oleh pekerja.

Ongkos Kewarasan Ditanggung Sendiri

SINDIKASI juga menemukan bahwa 92,2 persen mengakui pemberi kerja tidak pernah memberikan subsidi untuk

membayarkan penanganan gangguan mental. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Ara dan Ino.

Untuk melakukan sesi konseling dengan tenaga profesional, Ino mesti merogoh ratusan ribu ribu setiap sesi. Perusahaan Ino memang memiliki asuransi swasta namun asuransi tersebut ternyata tidak bisa menanggung untuk masalah kesehatan mental. Sehingga Ino mesti menanggung seluruh biaya konseling dengan uangnya.

Sementara itu, Ara justru merogoh kocek lebih dalam. Ia perlu mengeluarkan uang hingga sekitar Rp2 juta untuk sesi konseling dan juga pengobatan selama waktu kurang lebih dua minggu. Tempat Ino dan Ara juga tidak menyediakan fasilitas konseling untuk para pekerjanya. Persis seperti temuan SINDIKASI yang menyatakan bahwa 88,1 persen responden tidak disediakan konseling psikolog di tempat kerjanya.

Padahal, gangguan stres pascatrauma, gangguan mental dan gangguan perilaku yang berkaitan dengan hubungan langsung antara paparan terhadap faktor risiko yang muncul akibat aktivitas pekerjaan juga telah diakui sebagai penyakit akibat kerja dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

Selain itu, perusahaan dan pemberi kerja juga punya kewajiban melakukan pengukuran dan pengendalian faktor psikologi seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Mereka diwajibkan untuk melakukan pengendalian, beberapa di antaranya dengan program kebugaran bagi tenaga kerja dan juga mengadakan konseling bagi pekerja.

Minimnya Pengawasan

Namun dalam praktiknya, pengawasan bagi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak menjalankan amanat dari peraturan tadi masih sangat minim. Hal itu juga dikonfirmasi oleh dr Olin Aditama, salah satu staf Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa secara prinsip memang ada fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian tempatnya bekerja. Perusahaan atau pemberi kerja yang tidak melakukan pengukuran dan pengendalian, lanjut Olin, akan diberi nota pengawasan ketenagakerjaan satu dan dua hingga dikenakan sanksi secara administratif.

Tapi pengawasan terkait pelanggaran ketenagakerjaan termasuk juga yang berkaitan dengan K3 masih sangat minim. Hal itu salah satunya disebabkan oleh timpangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan hingga triwulan IV Tahun 2020, tercatat 1.686 pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) *Online* telah mencapai 343 ribu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 9,4 juta orang. Artinya setiap satu orang pengawas ketenagakerjaan harus mampu mengawasi sekitar 203 perusahaan.

Ketimpangan jumlah pengawas tadi yang juga menjadi sorotan Ketua Umum SINDIKASI Nuraini. Ia mengatakan bahwa selama ini keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan memang selalu menjadi pembenaran dari pihak pemerintah. Terlepas dari itu, Nuraini 'Nura' mengatakan bahwa perspektif K3 yang dimiliki oleh perusahaan dan juga pemerintah masih lebih sering menitikberatkan pada kesehatan fisik.

Mengakui Kesehatan Mental dalam Undang Undang K3

Oleh sebab itu lanjut Nura sejak pertama kali berdiri pada 2017, SINDIKASI menjadi salah satu serikat yang terus mengadvokasi isu kesehatan mental sebagai bagian dari kerja layak. Nura mengatakan bahwa karakteristik pekerja di industri media dan kreatif, termasuk teknologi cukup berbeda dengan pekerja di manufaktur. Sehingga kerentanan yang muncul juga berbeda.

“Sebagai pekerja immaterial kami lebih banyak memproduksi pengetahuan, informasi dan juga komunikasi, isu K3 yang kami alami bukan lagi hanya kesehatan fisik yang berkaitan alat produksi atau kondisi tangannya terpotong atau kena alat produksi,” ujar Nura.

“Kami lebih sering terpapar dengan isu kesehatan mental seperti stres, hingga depresi karena tekanan kerja.”

Nura mengungkapkan bahwa saat SINDIKASI berdiri, isu kesehatan mental dan faktor psikologis belum masuk dan diatur dalam Permenaker terkait K3. Kondisi tersebut yang membuat SINDIKASI menjadi salah satu pionir yang mengadvokasi isu kesehatan mental. Salah satunya dengan membuat kajian dan kertas posisi berjudul “Kerja Keras Menukar Waras” serta melakukan audiensi ke sejumlah pemangku kebijakan seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Bekraf dan juga BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami ingin mendesak pemerintah mengatur regulasi kesehatan mental sebagai K3. Kami tidak hanya membahas pentingnya kesehatan mental dalam kerangka K3 tapi kami ingin para pekerja mendapatkan kerja layak sehingga mereka bisa *work life balance*,” kata Nura.

Terlebih kerentanan yang dialami oleh pekerja saat ini semakin berlipat ganda di tengah situasi pandemi dan juga disahkannya Undang Undang Cipta Kerja yang dinilai Nura semakin melemahkan situasi buruh atau pekerja.

“Kerentanan yang semakin besar ini tentu juga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat. Aturan K3 ini masih menempel di permenaker dan sifatnya imbauan. Jadi semestinya masuk di undang undang, K3 tidak lagi imbauan,” ujar Nura.

“Dalam kerentanan yang berlapis, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita perlu berserikat yang menjadi salah satu jalan paling masuk akal untuk memperkuat posisi kita.”

Catatan Redaksi: Hidup seringkali sangat sulit dan membuat stres, tetapi kematian tidak pernah menjadi jawabannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit dan berkecenderungan bunuh diri, sila hubungi dokter kesehatan jiwa di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Anda juga bisa menghubungi LSM Jangan Bunuh Diri melalui email janganbunuhdiri@yahoo.com dan telepon di 021 9696 9293. Ada pula nomor hotline Halo Kemkes di 1500-567 yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi di bidang kesehatan 24 jam.

Tanggal muat 29 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Fransiskus Wisnu Wardhana Dany
Harian Kompas

Wartawan Harian Kompas sejak tahun 2019. Saat ini tergabung dalam Desk Regional dengan fokus liputan pada isu-isu perkotaan di Jabodetabek.

Topik kompetisi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Masa Pandemi COVID-19 ini sangat menarik sekaligus membuka pintu untuk melihat realita K3 di berbagai bidang, termasuk pekerjaan sebagai wartawan atau jurnalis.

Sopir TransJakarta, Satu Kemudi Beda Nasib

Fransiskus Wisnu Wardhana Dany (Harian Kompas)



Bus Transjakarta tengah mengantre untuk memulai operasional pengangkutan penumpang di Halte Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021). Waktu antrean berkisar dari 5 menit sampai 20 menit. KOMPAS/STEFANUS ATO

Pramudi sama-sama memikul tanggung jawab besar dalam berbagai keterbatasannya. Mereka harus menjaga keselamatan jutaan penumpang TransJakarta dengan kontrak kerja yang berbeda-beda.

M (50) melahap sepiring nasi berlauk telur di warteg kawasan Jakarta Pusat, Minggu (5/12/2021) siang. Ia lalu menyeruput segelas kopi sambil sesekali mengisap sebatang rokok. Kantong

mata pramudi TransJakarta rute Rawa Buaya, Jakarta Barat itu kehitaman. Wajahnya pun tampak lesu.

“Jadi sopir TransJakarta itu berisiko. Misalnya saya masuk siang selesai operasi pukul 22.00. Setelah itu saya harus antri isi bahan bakar. Sering kali bisa antri sampai pukul 01.00. Enggak kuat kadang-kadang,” ujar lelaki asal Semarang, Jawa Tengah yang setahun terakhir menjadi pramudi.

M menuturkan, tidak semua sopir TransJakarta berada dalam kondisi ideal ketika mengemudi. Waktu tidur terbatas lantaran tugas mereka tak hanya sebatas melayani penumpang.

Contohnya seusai mengisi bahan bakar, bus harus dibawa kembali ke pul. Hal itu acap kali membuatnya baru tiba di kontrakan pukul 03.00 dan harus kembali berangkat pukul 05.00 jika mendapat sif pagi.

Menurut dia, operator menyediakan dua pramudi untuk setiap unit bus. Mereka biasanya bergantian bertugas. Satu pramudi bertugas dari pukul 05.00 hingga pukul 13.00. Kemudian pramudi kedua bertugas dari pukul 13.00 hingga pukul 21.30 atau 22.00. Setiap pramudi punya target mengemudi minimal 100 kilometer setiap hari.

“Memang ada dua sif kerja. Tetapi jadwal kerja tidak teratur. Misalnya hari ini saya masuk siang, besok bisa jadi masuk pagi. Jam tidur saya *jumping* (tidak teratur),” ucapnya.

M berstatus pekerja harian lepas dari salah satu operator yang bekerja sama dengan TransJakarta. Artinya dia dibayar berdasarkan jam kerjanya. Sejauh ini upah yang didapatkan setiap bulan rata-rata Rp3 juta. Pendapatan itu belum termasuk uang makan Rp50 ribu setiap hari.

“Kami tidak ada tunjangan lain, hanya gaji dan uang makan. Jaminan kerja yang saya dapat hanya jaminan kecelakaan kerja,” ucapnya yang harus berutang Rp20 ribu kepada pemilik warteg untuk sepiring nasi telur, segelas kopi hitam dan sebatang rokok.

Dari total gaji Rp3 juta itu, M mengeluarkan Rp800 ribu untuk membayar kontrakan di kawasan Gelora, Jakarta Pusat. Dia juga bakal mengirim Rp1 juta ke keluarganya di kampung lantaran M selama bekerja di Jakarta, istri dan anak-anaknya tetap tinggal di kampung.

Tanpa Kepastian

Mkini bekerja tanpa kepastian. Dia masih kepikiran dengan desas-desus penghentian pramudi yang identitas kependudukannya masih luar DKI Jakarta. "Saya beban sekali. Kalau ada lowongan kerja lain bantu saya ya. Posisi saya terancam, KTP saya masih luar Jakarta," katanya.

Isu yang santer dan jadi perbincangan di kalangan pekerja di PT TransJakarta maupun operator-operator bus itu memang meresahkan. Namun tidak ada narasumber resmi yang dapat memastikannya. Selama ini, pramudi bus memang terbagi dua. Ada yang langsung bekerja di bawah PT TransJakarta dan ada yang berstatus pekerja di perusahaan operator yang berkontrak dengan PT TransJakarta.

Meskipun ada standar tertentu yang seharusnya berlaku baik sebagai sopir di PT TransJakarta maupun operator, tidak selalu standar itu diterapkan dengan memadai terutama untuk pramudi yang bekerja di perusahaan operator.

Perasaan tidak pasti seperti dialami M menghinggapi pula banyak pramudi lain. Muskim, misalnya, yang Senin sore itu tengah duduk bersama rekan pramudi lain di samping bus-bus TransJakarta yang terparkir di akses masuk Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Di sana mereka tengah mengantre jadwal operasional yang memakan waktu 5 hingga 20 menit.

Pramudi rute Blok M ke Cipedaq itu bekerja Senin hingga Jumat dalam dua sif, pagi dan siang secara bergantian. Dalam sehari operasionalnya 4-5 jam untuk rute sepanjang 40 kilometer.

"Sebulan tidak tentu. Sesuai kilometer. Besarnya tidak sampai

UMR (upah minimum regional),” katanya sembari menghela napas. UMR Jakarta tahun 2021 sebesar Rp4,4 juta.

Muskim mengatakan, pramudi sepertinya bekerja sesuai kontrak antara operator dan TransJakarta. Satu bus dikemudikan dua pramudi sesuai sif dan panjang rutenya berbeda-beda.

”Ada pramudi yang dapat 40 kilometer pulang pergi. Ada juga hanya 15 kilometer pulang pergi. Jadi tidak sama setiap bus,” ucapnya.

Di balik ketidakpastian, lelaki paruh baya itu bersyukur bisa memperpanjang sertifikat mengemudi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Perpanjangan dilakukan setelah kecelakaan beruntun bus TransJakarta di Cililitan, Jakarta Timur dan Senayan, Jakarta Pusat.

Dia juga bakal menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pemeriksaan yang sudah lama tak dijalaninya semenjak jadi pramudi tiga tahun lalu.

Pekerjaan Ideal

Siang di hari yang sama di Halte TransJakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Yayank (35) mengantre dengan sabar di Jalur TransJakarta Halte Harmoni. Lelaki asal Garut, Jawa Barat itu tersenyum sembari bercerita bahwa bekerja sebagai pramudi dari salah satu mitra TransJakarta sungguh mengasyikkan.

Jam kerja mereka teratur yakni delapan jam kerja setiap hari. Dari delapan jam itu mereka tak harus bekerja non-stop karena diberi waktu istirahat satu atau dua jam. Waktu libur mereka satu bulan paling sedikit empat hari. Di saat tertentu, akumulasi hari libur bahkan bisa sampai satu pekan.

”Kerja paling benar ya di TransJakarta. Target kerja sebenarnya tidak ada. Kami sesuai standar operasional saja,” ucap pramudi TransJakarta Rute Harmoni-Lebak Bulus itu.

Salah satu standar operasional yang dimaksud Yayank antara lain mereka setiap bulan minimal harus mengemudi bus mulai dari 20-24 hari kerja atau 20-24 surat pertanggungjawaban (SPJ). Jika dia memenuhi 20-24 SPJ, penghasilan yang didapatkan mencapai Rp5 juta tiap bulan.

“Kalau saya rata-rata 20 hari SPJ, karena harus berbagi dengan teman-teman juga. Sopir kan banyak, jadi kalau ada teman yang SPJ-nya belum sampai 20, kami bantu,” ucap lelaki yang tinggal di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur itu.

Selain waktu kerja yang fleksibel, Yayank menuturkan bahwa perusahaan otobus tempatnya bekerja juga menyediakan mes. Meski sudah memiliki rumah, Yayank saat ini memilih untuk tinggal di mes di daerah Ciputat, Jakarta Timur. Mes itu satu kesatuan dengan pool bus. Dia hanya kembali ke rumahnya saat hari libur.

Mes itu sangat membantu para pramudi yang bertugas atau masuk sif pagi. Sebab meski ada pramudi yang memiliki rumah di Jakarta, mereka dibolehkan perusahaan untuk menginap di mes itu agar memiliki waktu tidur yang cukup sebelum mengoperasikan kendaraan di pagi hari.

Yayank sudah hampir satu tahun bekerja di perusahaan otobus mitra TransJakarta. Sebelum jadi pramudi mitra, Yayank dua tahun bekerja sebagai pramudi yang terikat kontrak langsung dengan PT TransJakarta. Namun kontrak kerjanya harus berakhir setelah manajemen mengurangi jumlah karyawan imbas pandemi.

Selama dua tahun terikat kontrak kerja dengan PT TransJakarta, kemampuan mereka hampir setiap saat diperbarui. Setiap kali ada kendaraan baru, mereka selalu mendapatkan pelatihan.

Saat ini, setelah Yayank bergabung dengan salah satu operator bus mitra TransJakarta, pelatihan itu juga masih sering mereka peroleh. Namun tidak lagi serutin saat masih bersama PT TransJakarta. Di perusahaan mitra, pelatihan biasanya mereka

peroleh dari pihak eksternal, salah satunya dari kepolisian dan agen pemegang merek.

Sorotan Publik

Di balik suka duka bekerja sebagai pramudi, TransJakarta tengah menjadi sorotan publik. Selama satu pekan terakhir terjadi tiga kecelakaan beruntun melibatkan bus TransJakarta. Berdasarkan data PT TransJakarta, dari Januari hingga Oktober 2021, ada 504 kecelakaan.

Pengamat transportasi Djoko Setijawarno mengatakan, insiden kecelakaan TransJakarta akhir-akhir ini dinilai sebagai imbas dari buruknya manajemen TransJakarta. Belajar dari operator angkutan umum kereta api, PT KAI, kata Djoko, TransJakarta yang melayani jutaan penumpang harus membentuk dan memiliki divisi keselamatan.

"Kita tahu, dulu kereta-kereta PT KAI sering mengalami kecelakaan. Itu terjadi akibat manajemen yang buruk. Setelah melalui pembenahan manajemen, sekarang kecelakaan di kereta api menjadi yang paling rendah," kata Djoko, (Kompas, 6/12/2021).

Direktur Utama TransJakarta Mochammad Yana Aditya menuturkan, pihaknya langsung mengambil tindakan pencegahan supaya kecelakaan tak berulang sembari menunggu hasil penyelidikan polisi.

Sebulan terakhir tengah berlangsung pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada pramudi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan klinik, pembinaan oleh *master driver* TransJakarta dan Polda Metro Jaya serta pemeriksaan armada bekerja sama dengan agen pemegang merek.

Operator mitra TransJakarta juga wajib mengecek seluruh busnya, kesehatan fisik dan mental pramudi, serta perbaikan prosedur berkendara. Di sisi lain TransJakarta menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk

perbaikan aspek keselamatan seperti evaluasi kondisi jalan dan lalu lintas, kondisi pengemudi dan berkendara, armada yang mencakup perawatan dan pemeliharaan serta pembenahan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Tanggal muat 9 Desember 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Ayu Prawitasari
Solopos.com

Penulis adalah jurnalis Solopos Media Group. Tidak hanya menulis berita, saat ini juga asyik menulis esai dan cerita pendek di berbagai media. Kebanyakan tulisannya bertema mengenai perempuan. Dia berharap perempuan bisa mendapatkan ruang hidup yang layak sebagai manusia, seperti halnya laki-laki. Jadi, kapan itu terwujud?

Terkait dengan project buku ini, penulis mengucapkan terima kasih. Project ini memberinya kesempatan untuk membuat satu tulisan baru mengenai tenaga kerja perempuan yang jumlahnya sangat banyak, namun dari sisi keamanan kerja sungguh minim karena belum adanya regulasi yang memihak. Semoga pemerintah segera berbenah.

Penulis dapat dihubungi di IG @ayuprawitasari atau kirim surel di setjangkirsendja@gmail.com

Para Perempuan yang Bekerja Tanpa Pengaman

Ayu Prawitasari (Solopos.com)



Pelecehan seksual (freepik).

Pandangannya sering kali tak pernah benar-benar lurus ke depan. Apalagi saat dia sedang berjalan sendirian. Namun ketika sedang banyak orang, perempuan itu tetap saja tidak tenang.

Saat tak ada orang di sekitarnya, perempuan itu makin sering menoleh, melihat keadaan di sekelilingnya. Namun sering kali

juga yang dia lihat hanya dinding dan kelas-kelas yang kosong. Pandemi Covid-19 membuat gedung sekolah lebih sering sepi. Perempuan itu lantas meyakinkan dirinya tak ada bahaya yang mengancam dan tak ada yang perlu dicemaskan. Semua akan baik-baik saja.

Dia selalu merasa ada yang mengawasi langkah-langkahnya bahkan saat dia sedang berbicara, mengobrol dengan rekan-rekan guru yang lain. Perempuan itu merasa sedang diawasi.

Perasaan seperti diawasi itu muncul sejak kali pertama dia menginjakkan kaki di sekolah itu. Saat dia diterima bekerja sebagai guru di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Karanganyar, Jawa Tengah.

“Waswas seperti diawasi dan rasa jijik yang bercampur menjadi satu,” begitu deskripsi perempuan yang minta dipanggil Ani itu tentang perasaannya.

Sebuah kejadian tak menyenangkan di masa lalu pada awal dia menjadi guru terus melekat di memorinya. Kejadian itu bertalian dengan berbagai kejadian baru yang sama-sama tak menyenangkannya hingga saat ini. Semuanya itu terjadi di tempat kerjanya. Di sekolah.

“Kondisi serba tak enak ini berawal dari sebuah liburan di luar kota bersama para guru. Foto-foto lantas dibagikan di grup *WhatsApp*. Seorang guru senior kemudian mengirim foto *candid* saya disertai tulisan ‘tinggal pakai pakaian Papua lantas mendirikan kemah. Saya akan langsung ke situ’,” kata dia pekan lalu.

Belum cukup terkejut, Ani mengaku syok saat foto itu disusul dengan foto-foto perempuan berbusana seksi. Dia marah namun tak tahu apa yang harus ia lakukan. Diam dan mengabaikan adalah pilihan sikapnya meski dia tahu itu bukanlah pilihan terbaik. Namun menurut dia, itu pilihan yang aman.

Kesehatan Mental

“Yang bisa saya lakukan hanya menampakkan wajah tak senang dan berkata pada guru senior itu bahwa saya tak suka dengan perilakunya. Saya tak bisa berbuat lebih dari itu. Saya juga tak bisa berbuat apa-apa saat rekan saya mengalami hal yang sama. Yang mengejutkan, murid saya juga mengalami mendapat kiriman foto-foto wanita berpakaian minim. Selain sering mengirim foto seksi, dia juga sering melakukan pelecehan verbal kepada perempuan. *Patriarchy does really exist*. Perempuan tidak pernah aman meski itu di lembaga yang bernama sekolah sekalipun,” kata lulusan pascasarjana dengan minat utama Studi Gender ini.

Saat sekolah tidak memberikan jaminan keamanan bagi para perempuan pekerja lintas bagaimana dengan bidang kerja yang para karyawannya didominasi laki-laki?

Seorang perempuan satpam yang bekerja di Solo, Jawa Tengah, mengatakan kondisinya menjadi jauh lebih sulit. Sebagai seorang perempuan satpam, dia menjadi kelompok yang minoritas di perusahaan tempat dia bekerja. Mayoritas satpam di perusahaan tempatnya bekerja adalah laki-laki, tepatnya enam perempuan dari total 200 laki-laki. Jumlah laki-laki yang mendominasi menyebabkan kultur kerjanya menjadi sangat maskulin. Kultur ini mendorong situasi laki-laki lebih banyak berbicara dan mengambil keputusan dalam hal pembagian hingga evaluasi kerja.

“Pelecehan seksual terus terjadi di perusahaan saya bekerja tanpa ada penyelesaian yang tegas. Saya pun mengalaminya,” kata dia.

Bentuk pelecehan yang dia alami adalah pelecehan verbal seperti menyebut anggota tubuh seperti dada atau pantat yang seksi hingga mencubit pantat.

Mengutip tulisan Sri Kurnianingsih yang berjudul *Pelecehan terhadap Perempuan di Tempat Kerja* yang dipublikasikan di Buletin

Psikologi UMGM edisi Desember 2003, berdasarkan kategori perilaku, pelecehan seksual adalah rayuan seksual baik itu halus maupun kasar, terbuka, dan bersifat fisik maupun verbal yang tidak dihendaki sasarannya.

Sifat pelecehan seksual ini searah seperti komentar seksis dan cabul tentang pakaian atau tubuh sasaran. Bentuk lain adalah tatapan sugestif pada bagian tubuh, merabanya, mencubitnya, menggelitik, mencium dan sejenisnya.

“Saya selalu merasa takut dan risih. Sebenarnya sudah saya katakan pada pelaku bahwa saya tidak suka dengan perilakunya tapi dia tak pernah jera. Pernah suatu saat saya mengancam akan melaporkan perilakunya itu pada atasan, baru waktu itu dia kelihatan takut. Dia tidak pegang-pegang saya lagi meski yang [pelecehan] secara verbal masih,” kata perempuan itu.

Kondisi tersebut membuat perempuan tersebut tak tenang. Secara fisik dia tidak bermasalah namun dia mengaku kesehatan mentalnya terganggu.

“Terus terang saya tidak ingin bertemu dia [pelaku]. Tapi ya tidak bisa. Pasti bertemu. Meski begitu sebenarnya yang lebih saya takutkan adalah sistem *rolling* di perusahaan kami. Jadi pasangan satpam di tempat kami selalu diganti-ganti. Nah saya takut suatu saat berpasangan dengan dia,” kata dia.

Catahu

Gelisah yang terus-menerus membuat perempuan itu memberanikan diri untuk bercerita pada rekan-rekannya sesama perempuan satpam. Baru dia tahu bahwa temannya mengalami hal serupa. Mereka, berdua lantas bertanya pada perempuan satpam yang lain. Hasilnya sama, semua mengalaminya. Para perempuan satpam itu akhirnya melaporkan apa yang mereka alami pada atasan mereka.

“Tidak ada hukuman dari atasan kami. Salah satu pertimbangan karena rekan kerja kami itu oknum itu sudah punya keluarga. Jadi

atasan kami merasa kasihan. Keputusan yang paling mungkin adalah membuat jadwal tugas yang menjauhkan laki-laki itu dari perempuan satpam. Keputusan itu sedikit melegakan kami meski ketika di kantor ya kami ketemu dia lagi,” kata dia yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Inilah ironi perempuan satpam yang tugasnya melindungi orang lain. Namun mereka sendiri justru tak mendapat perlindungan layak dari perusahaan maupun dari regulasi.

Mengutip Catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021, kekerasan seksual di lingkungan kerja memang sering menjadi pembicaraan dan diskusi di berbagai komunitas. Namun kasus itu justru kurang dilaporkan secara resmi.

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perempuan, sebanyak 91 atasan di tempat kerja merupakan pelaku kekerasan seksual di tempat kerja di mana pada tahun sebelumnya hanya 55 kasus. Kondisi ini menunjukkan lingkungan kerja bukanlah tempat yang aman. Perlu ada aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Di tempat kerja, laki-laki mempunyai kekuasaan karena masyarakat membentuknya demikian. Apabila atasan itu laki-laki, ia memiliki dua kuasa sebagai atasan dan sebagai laki-laki. Pelecehan seksual terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

Komnas Perempuan memandang perlu adanya aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja termasuk pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Sementara itu Direktur Yayasan Spek-HAM Solo, Rahayu Purwaningsih, menjelaskan, kultur patriarki dan tidak adanya regulasi memadai membuat tempat kerja perempuan menjadi tempat yang berbahaya. Jutaan perempuan bekerja tanpa pengaman di tempat-tempat itu.

Sejumlah regulasi yang mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak membahas secara spesifik mengenai perlindungan perempuan terhadap potensi pelecehan seksual hingga kekerasan seksual, pemerkosaan misalnya. Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai contoh.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 76 hingga Pasal 84 yang mengatur soal perempuan contohnya lebih mengatur hal-hal teknis mengenai hak pekerja dalam dunia kerja mulai dari jam kerja, hak perempuan saat haid, hamil, keamanan perempuan yang bekerja di waktu malam dan sejenisnya. Pasal 76 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan menjaga kesusilaan dan keamanan untuk perempuan yang bekerja masih sangat global. Regulasi lain lebih banyak mengatur soal kecelakaan kerja di lingkup manufaktur.

“Pemerintah belum melihat pelecehan dan kekerasan seksual sebagai kecelakaan kerja. Sudut pandang ini jelas merugikan perempuan yang bekerja di lingkungan patriarki. Spek-HAM terus-menerus menerima pengaduan soal ini. Namun konyolnya sama sekali tidak ada data di Dinas Ketenagakerjaan. Kami coba cek di dinas kota sampai provinsi sama sekali tidak ada data mengenai perempuan yang mengalami pelecehan hingga kekerasan seksual,” kata Rahayu.

Tidak adanya regulasi memihak perempuan, sambung Ayu, sapaan akrabnya, membuat kasus pelecehan dan kekerasan menjadi seperti angin lalu. Berbeda dengan kecelakaan fisik yang ditanggung Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, kekerasan seksual tidak.

“Pusat tidak mengatur jadi ya tidak ada dananya. Kebutuhan visum saja kami harus minta pada pemerintah daerah,” imbuhnya.

Saat upaya mendapatkan hak untuk visum dan pemulihan fisik saja susah maka upaya pemulihan mental menjadi hal yang hampir tak mungkin. Pada kondisi inilah para pekerja perempuan lebih banyak mengandalkan peran-peran NGO.

Manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat Spek-HAM, Fitri Haryani mencontohkan salah satu kasus yang dia tangani.

“Kami baru saja menangani kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Ini kasusnya antara pimpinan dan staf. Jadi stafnya ini berkali-kali dicitum secara paksa dan diraba-raba oleh atasannya. Yang menyedihkan, dengan proses hukum yang perjalanannya sampai dua tahun, hukuman untuk pelaku hanya empat bulan subsider Rp100 juta. Korban hingga saat ini syok dan tidak bisa bekerja. Nah pemulihan korban ini memang tidak dipikirkan sama sekali,” ujar Fitri.

Sudah saatnya lanjut Ayu, pemerintah pusat meratifikasi Konvensi International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. “Sejumlah regulasi tentang K3 harus menyesuaikan sehingga kasus pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja dapat diselesaikan melalui jalur ketenagakerjaan juga,” kata dia.

Dengan demikian, perempuan pekerja mendapat pengaman yang layak saat bekerja.

Tidak adanya pengaman bagi perempuan juga menjadi persoalan serius di saat pandemi. Menurut Ayu dari tahun ke tahun, jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah, di pabrik-pabrik dan di perkantoran contohnya semakin banyak. Jadi jumlah perempuan bekerja terus bertambah.

Saat ini para perempuan itu menghadapi bahaya ganda. Yang pertama, bahaya virus corona dan yang kedua, bahaya pelecehan serta kekerasan seksual yang terus terjadi namun juga semakin sulit dikendalikan dan dilaporkan. Itu terjadi karena pandemi

sekaligus membawa ancaman PHK dan sulitnya mencari kerja. “Jadi sampai kapan perempuan bekerja dalam bahaya?”

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan pekerja formal di Indonesia memang terus meningkat. Pada 2021 sebesar 36,20 persen perempuan bekerja di lingkup kerja formal, naik jika dibandingkan dengan 2020 yang hanya 34,65 persen. Kenaikan juga bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja profesional, 48,76 persen pada 2020 dibandingkan 2019 yang hanya 47,46 persen. Di Jateng, jumlah perempuan yang menjadi tenaga profesional ini bahkan mencapai 50,20 persen. Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2021 atau setahun sebelum UU Ketenagakerjaan disahkan yakni hanya 45,22 persen.

Sumbangan pendapatan dari tenaga kerja perempuan juga menunjukkan tren meningkat. Pada 2020 angkanya mencapai 37,26 persen. Sementara pada 2019 sebesar 37,10 persen. Hal ini menunjukkan peran perempuan yang memang signifikan dalam kegiatan ekonomi.

“Banyak perempuan yang tetap bekerja selama pandemi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kenaikan itu seharusnya diimbangi dengan regulasi yang memihak pada isu kesetaraan gender. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190. Serikat pekerja khususnya Divisi Perempuan harus mulai menyuarakan isu ini karena termasuk pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah saatnya kita harus bergerak tidak hanya memperjuangkan ruang laktasi atau cuti haid melainkan juga pada fenomena yang banyak menimpa pekerja perempuan tentang pelecehan dan kekerasan seksual,” kata Ayu.

Sementara saat K3 terwujud, menurut Abdul Hakim, salah satu pembicara yang merupakan perwakilan ILO dalam acara *Webinar Peliputan Media dan Literasi Berita tentang K3 di Masa Pandemi*, pada akhirnya berkorelasi dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini juga selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya *goals* ke-3 yaitu

good health dan wellbeing (kehidupan sehat dan kesejahteraan) serta *goals ke-8* yaitu *decent growth and economic growth* (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

“Juga *goals* kelima yaitu kesetaraan gender,” sambung Ayu. Menurut Ayu, saatnya perempuan mendapatkan ruang kerja yang aman dan sehat demi pembangunan berkelanjutan.

Tanggal muat 28 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Dian Muhtadiah Hamna
Pijarnews.com

Dian Muhtadiah Hamna, kelahiran Yogyakarta. Sehari-hari sebagai pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Makassar. Yayan, panggilannya mulai terjun di dunia jurnalistik sejak tahun 2005. Menjadi penyiar di Radio Kota Perak Yogyakarta, lalu bergabung di Harian Fajar Makassar (Jawa Pos Group) sebagai jurnalis hingga editor selama satu dekade. Lalu, tahun 2017 sebagai editor dan Pemimpin Redaksi di www.pijarnews.com, sebuah media onlie di Kota Parepare, Sulsel. Awal 2022, Yayan bergabung di Deutch Welle Indonesia, kantor berita asing berpusat di Jerman sebagai freelance writer. Yayan juga tercatat sebagai mahasiswi Program Doktor Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Hobinya hanya satu: mengkliping berita koran.

Tidak Mengenakan Perlengkapan K3, Nekat Bertugas Demi Tercapainya Vaksinasi

Dian Muhtadiah Hamna (Pijarnews.com)



Petugas vaksinasi Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep di atas kapal yang menuju Pulau Dewakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulsel duduk berdampingan saat bertugas beberapa waktu lalu.

Kisah Tim Vaksinator Covid-19 berjuang mencapai puulau-pulau terluar di Kabupaten Pangkep.

Bukan barang mudah mencapai target sasaran vaksin di pulau-pulau terluar di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Para tim vaksinator Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep ini kerap bertaruh nyawa di atas kapal kayu yang ditumpanginya saat kapal terombang-ambing di lautan akibat ombak yang kencang.

Medio Desember 2021 lalu, cuaca mendung kala itu. Namun semangat tim vaksinator Puskesmas Liukang Kalmas menyisir pulau-pulau terluar demi tugas vaksinasi bak senada gemuruh ombak menderu. Di atas kapal kayu mereka duduk merapat. Berbekal ransel dan jaket kain yang menempel di tubuh, 11 anggota tim vaksinasi ini menerabas angin kencang. Di antara petugas tenaga kesehatan (nakes) itu terlihat balita yang dipangku ibunya. Usianya sekitar 2 tahun.

Tak ada rompi pelampung sebagai pakaian pengamanan pertama yang dikenakan oleh seluruh penumpang. Padahal perjalanan laut ini bukan perjalanan yang singkat. Beberapa pulau harus disinggahi demi mencapai target vaksin sesuai wilayah tugas mereka pada 9 pulau, 1 kelurahan dan 4 desa. Siang itu, rombongan ini hendak menuju Pulau Dewakkang Lompo dengan waktu tempuh sekira 10 jam dari dermaga di Kabupaten Pangkep.

Wajah-wajah nakes yang berbalut masker ini menyimpan rasa gamang tak terkira. Kadang kapal berbenturan dengan karang sehingga sesaat tak mampu melaju membuat adrenalin para nakes ini kian memuncak. Apa daya, tugas kemanusiaan harus tetap ditunaikan.

“Ketika ada angin kencang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Takut? Pasti. Hanya berzikir dan istigfar yang bisa kami lakukan. Pernah kapal mati mesin karena ombak besar padahal itu hari tidak hujan. Pikiran kami ini sudah hampir ajal. Dalam kapal, kami terlempar-lempar. Lalu kami lihat ABK (Anak Buah Kapal). Kalau ABK-nya panik, kami ikut panik,” kisah St Kurnia, Kepala Puskesmas Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep kepada *Pijarnews.com*.

Perempuan 55 tahun ini menjadi kepala salah satu tim vaksinasi. Dia menyeberang pulau bersama 9 nakes dan seorang dokter untuk memvaksinasi warga pulau. Kurnia melanjutkan, jika kondisi menegangkan itu muncul, seluruh anggota tim vaksinasi menangis dan berpelukan. Mereka sering bingung hendak meminta tolong kepada siapa. Jaringan telepon selular

di wilayah kepulauan itu amatlah sulit. Sinyal hilang.

“Sisa pasrah. Saya berprinsip di manapun ajal bisa menjemput. Di darat maupun di laut,” katanya menerawang.

Diakui Kurnia, upaya vaksinasi warga pulau itu bukanlah tanpa aral mengadang. Selain susahny membujuk warga pulau untuk divaksin, petugas ini sendiri terkendala dengan biaya operasional menuju lokasi vaksin.

“Tahun 2021 ini kami tidak memiliki anggaran untuk sewa kapal padahal target vaksin harus dikejar. Jadi upaya yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala desa untuk diajak kerja sama. Misalnya di tiga desa yaitu Marasende, Kanyorannya dan Desa Dewakkang. Kami minta mereka mengantar jemput. Alhamdulillah sebagian ada yang setuju,” tambahnya.

Target vaksinasi yang harus mereka capai hingga akhir Desember 2021 lalu yaitu 9.000 jiwa yang berada di pulau-pulau di Kabupaten Pangkep. Disebutkan Kurnia, target vaksin di Pulau Dewakkang Lompo itu tercapai 81 persen setelah rombongan tim vaksinasi ini bolak-balik sebanyak 6 kali. Proses bolak-balik ini juga memakan waktu lama, bisa hanya 2 kali sebulan lantaran lalu lintas kapal yang terbatas.

“Itu yang bikin lelah. Tantangan lainnya, setiba di lokasi kami hanya tinggal di pustu (puskesmas pembantu) seluas 6x12 meter persegi. Tidur hanya beralaskan tikar. Itu bisa sampai dua minggu sampai kapal datang lagi,” papar Kurnia.

Dia juga menyebut selama ini tidak ada tunjangan khusus dari pemerintah daerah bagi tim vaksinasi yang telah berjuang mencapai pulau-pulau terluar ini.

Muhammad Akbar, vaksinator lainnya dalam tim mengatakan usaha menuju lokasi demi capaian vaksinasi Covid-19 itu bukan hal mudah. Dia hanya berharap pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan bagi para petugas tim vaksinasi tersebut.

“Saya hanya berharap tahun ini bisa diangkat menjadi THL (Tenaga Harian Lepas) bergaji. Syukur-syukur bisa diangkat jadi PNS juga,” ucapnya.

Status Muhammad Akbar sampai saat ini memang hanya sebagai THL non-bergaji di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep.

Kabupaten Pangkep memiliki luas wilayah 12.362,73 kilometer persegi dengan luas wilayah daratan 898,29 kilometer persegi dan wilayah laut seluas 11.464,44 kilometer persegi. Pangkep terdiri dari 13 kecamatan dan 4 kecamatan terdiri dari pulau-pulau. Dari bentangan 4 kecamatan kepulauan itu terdapat 115 pulau, 73 pulau berpenghuni dan 42 pulau tidak berpenghuni.

Pentingnya K3 dalam Perjalanan Laut

Sebelum melakukan perjalanan laut, hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tiap orang merupakan aspek yang harus dipenuhi. Sayangnya masih banyak yang belum paham mengenai pemenuhan aspek K3 tersebut. Padahal K3 ini penting sebagai upaya untuk mengurangi probabilitas kecelakaan kerja maupun penyakit yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam produktivitas kerja.

Pakar K3 Universitas Hasanuddin, M Furqaan Naiem mengatakan, ada beberapa *item* penting terkait K3 yang harus diketahui pengguna kapal sebelum melakukan penyeberangan laut. Misalnya beban muat kapal tidak boleh melebihi aturan yang dipersyaratkan. Kecukupan bahan bakar baik pulang maupun pergi hingga tersedianya stok bahan bakar jika kondisi darurat dan ketersediaan pelampung yang idealnya melebihi jumlah penumpang.

“Kalau jumlah pelampung lebih sedikit dari jumlah orang di dalam kapal itu berbahaya. Jadi lebih baik siapkan lebih. Lalu posisi penumpang dalam kapal harus diatur. Jangan sampai kapal berat di kanan atau di kiri. Jadi harus seimbang. Jangan juga ada yang duduk dekat mesin kapal sambil merokok,” kata

Doktor Jurusan Kesehatan Masyarakat dari Curtin University of Technology, Perth, Australia itu.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini melanjutkan bahkan jika ada penumpang yang harus duduk dekat mesin kapal, dia harus menggunakan alat pelindung telinga apalagi kalau penyeberangan memakan waktu lebih dari 15 jam.

“Penting sekali oleh Dinas Kesehatan setempat memberikan pelatihan K3 ini kepada para petugas vaksinator sebelum diterjunkan ke lapangan. Karena petugas kesehatan ini tetap harus waspada terhadap risiko-risiko perjalanan laut. Jangan diabaikan,” tandas pria kelahiran Padang Panjang, 4 April 1958. Furqaan yang mengambil Master Jurusan K3 di Curtin University of Technology Perth Australia ini menilai masih ada sejumlah Dinas Kesehatan di daerah yang tidak memaksimalkan program pelatihan K3. Padahal selayaknya dalam Dinas Kesehatan tersebut dibentuk unit yang khusus menangani K3.

“Kalau kita berbicara mengenai risiko perjalanan laut kaitannya ini dengan dua dinas, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Urusan K3 belum diterapkan secara tegas. Dinas Perhubungan perlu juga selalu intens memeriksa kelaikan kapal-kapal ini beroperasi,” katanya.

Furqaan menilai, dua instansi ini belum memasukkan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) terkait operasionalisasi K3 bagi pengguna kendaraan laut sehingga pelatihan yang pernah berjalan tidak terlalu maksimal.

“Banyak sekali masalah terkait K3 di lautan. Belum lagi perlunya dihadirkan ambulans laut untuk mengangkut warga pulau jika kondisi *emergency*. Di negara maju bahkan sudah disiapkan ambulans helikopter,” paparnya.

Diakui Furqaan, risiko perjalanan laut memang cukup besar apalagi untuk menjangkau pulau-pulau terluar di mana jaringan komunikasinya juga kerap menemukan kendala.

“Ini juga memprihatinkan. Alat komunikasi tidak berfungsi karena tidak ada *tower* di pulau-pulau terluar. Toh kalau pun ada ambulans laut, lagi-lagi persoalan telekomunikasi bagaimana memanggil ambulans laut ini. Inilah persoalan pelik sistem kesehatan kita di atas kertas. Mungkin ada tetapi tidak sinkron dengan kondisi di lapangan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Herlina menyatakan, para tim vaksinator ini sebelum diterjunkan ke lapangan sesungguhnya telah dibekali pelatihan K3.

“Sebenarnya kita pernah memberikan pelatihan K3 bagi mereka yang digelar langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi tim vaksinator ini orang-orang terlatih,” jelasnya.

Soal beratnya medan, bagi Herlina hal itu sudah risiko pekerjaan sebab mereka harus mencapai target vaksinasi di manapun lokasinya. “Itu sudah tugas mereka. Risikonya berlaku untuk semua tim nakes baik yang bertugas di darat, di gunung bahkan di laut,” katanya.

Mengenai tunjangan yang dipertanyakan para tim vaksinasi ini diakui Herlina bahwa Dinas Kesehatan setempat belum bisa memberikan tunjangan tambahan karena status mereka sebagian telah menjadi ASN.

Tanggal muat 31 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Hasya Nindita
Kompas.tv

Lulus dari Ilmu Komunikasi UGM pada 2020, saat ini bekerja sebagai reporter untuk megapolitan desk di Kompas.tv. Sebelumnya pernah menjadi kontributor penulis untuk Tirto.id dan menjadi Pemimpin Redaksi untuk media musik independen WarningMagz.

Mengerjakan untuk kompetisi ini tentu menyenangkan dan penuh pengalaman baru baik dalam menulis dan bertemu dengan orang-orang baru di lapangan.

Antara Maut dan Doa Dalam Hidup Tukang Gali Makam Covid-19

Hasya Nindita (Kompas.tv)



Suasana pemakaman Covid-19 di TPU Bambu Apus, Kamis (27/1/22). (Sumber: Kompas.tv/HASYA NINDITA)

Bersama 17 kawannya, Husen (46) berbaring di atas tanah gembur tidak jauh dari dua lubang makam yang baru mereka gali di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bambu Apus, Jakarta Timur, malam itu, pertengahan Juli 2021. Tubuh mereka lunglai

belaka usai bertungkus-lumus menguburkan puluhan jenazah. Di atas gundukan tanah itulah mereka coba sejenak beristirahat sebelum Adi, petugas administrasi TPU tersebut yang punya nama lengkap Yosaphat Adhyaksa berteriak ke arah para tukang gali makam itu.

“Masih ada dua jenazah lagi ya!”

Jam operasional TPU Bambu Apus sebetulnya telah berakhir sejak pukul 16.00. Tapi situasi pandemi yang tengah melonjak membuat mereka masih bertahan untuk pelayanan. Dua jenazah tadi adalah dua jenazah terakhir malam itu.

Situasi semacam itu sebetulnya bukan hal asing bagi Husen. Ia masih ingat betul sepanjang Juni-Agustus 2021, TPU Bambu Apus kewalahan menerima jenazah Covid-19. Belasan mobil ambulans dengan sirine saling bersahutan berjajar menyesaki jalan setapak yang belum lama dicor sepanjang TPU hingga gerbang pemakaman. Tiap keluarga akan menunggu dalam jarak batas aman. Sementara Husen dan kawan-kawannya bergegas pindah dari satu liang kubur ke liang lainnya untuk membantu mengurai antrean ambulans yang sudah mengular.

Akibat kekurangan tenaga penggali kubur, sejumlah petugas pemakaman dari TPU Pondok Ronggon didatangkan sebagai bala bantuan. “Kami total di sini sekitar 18 petugas yang gali itu enggak mumpuni waktu itu yang setiap hari minimal 40 makam. Akhirnya ada petugas dari TPU Pondok Ronggon bantu kami,” kata Adi di TPU Bambu Apus, Kamis (27/1/22).

Bala bantuan itu nyatanya belum juga cukup karena jenazah demi jenazah terus berdatangan. Pihak TPU Bambu Apus akhirnya mendatangkan sebuah kendaraan taktis untuk membantu penggalan agar lebih cepat yakni sebuah ekskavator.

Adi bercerita, saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat virus corona varian Delta, TPU Bambu Apus menerima sebanyak 40-50 jenazah setiap harinya. Hanya dalam dua bulan, lahan seluas

kurang lebih satu hektare yang setidaknya mampu menampung hingga 2.000 jenazah tersebut sudah terisi penuh.

Total luas TPU Bambu Apus kata Adi, mencapai lima hektare. Namun lahan yang baru digunakan untuk pemakaman baru sekitar dua hektare sementara sisanya masih disiapkan. Dari dua hektare tersebut, sebanyak tujuh blad pemakaman diperuntukkan untuk jenazah Covid-19. Sementara tiga blad digunakan untuk pemakaman umum.

“Total (makam) Covid-19 kami sekitar 1.900 sampai 2.000. Kami ada tujuh *blad* untuk pemakaman Covid-19. Lainnya itu untuk reguler dan enggak dicampur *sih* karena jenazah Covid-19 pakai peti dan *space*-nya lebih besar,” kata Adi.

Mengutip data dari laman corona.jakarta.go.id, per 29 Januari 2022 sebanyak 32.002 jenazah dimakamkan dengan prosedur tetap Covid-19 di Jakarta. Sementara angka kematian secara nasional sudah mencapai 144 ribu kematian sejak Covid-19 melanda. Puncaknya terjadi pada periode Juni – Agustus 2021 lalu. Dalam satu hari, kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 2.000.

Sementara yang paling tinggi terjadi pada 27 Juli 2021. Hari itu ada 2.069 orang yang meninggal.

Kebanjiran Order, Kebanjiran Risiko

Petugas pemakaman kala itu ibarat kebanjiran *order*. Tidak hanya jam kerja yang bertambah dan waktu istirahat yang hampir nihil, risiko pekerjaan jelas tidak lagi sembarangan. Mereka yang sebelumnya hanya bermodalkan kaus dan sepatu bot ketika turun ke liang lahat, kini harus memastikan keamanan dan keselamatan diri sendiri dengan sejumlah peralatan dan prosedur.

Nahasnya ketika mereka mempertaruhkan leher karena risiko pekerjaan, di kawasan rumah para penggali makam tersebut justru tak ubahnya *public enemy* yang terus menerus diselidiki

dan dihindari oleh tetangga sekitar. Inilah risiko sosial di samping risiko nyawa yang mesti mereka hadapi.

Husen memaklumi sikap tersebut dan menerima kenyataannya. “Jangankan dijauhi masyarakat, sama keluarga sendiri saja kayak enggak dianggap,” katanya sambil tertawa.

Ritual harian Husen setiap pulang kerja seperti di bawah ini.

Sang istri tidak akan membolehkannya untuk langsung masuk rumah. Ia diminta untuk bersih-bersih dahulu di luar rumah dengan seember air yang telah disiapkan. Pakaian bekas pemakaman juga wajib ditinggalkan di halaman. Setelah semuanya rampung, barulah Husen dipersilakan masuk ke rumah, rumahnya sendiri.

Dihubungi terpisah, Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menjelaskan, petugas pemakaman Covid-19 wajib menerapkan prosedur tetap atau protap Covid-19 lengkap dengan alat-alat pelindung diri.

“Prinsipnya *gini*, kalau orang habis meninggal, tentu virusnya enggak akan langsung mati,” kata Zubairi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (29/1/22).

Sejumlah alat yang wajib digunakan oleh penggali kubur dengan protap Covid-19 ialah alat pelindung diri (APD), tutup kepala, masker N95 atau KN 95, *face shield* atau kacamata *google*, sepatu dan sarung tangan. Prof Zubairi menambahkan, ada bagian tubuh jenazah yang perlu diperhatikan karena rawan akan penularan yakni mata, hidung, tenggorokan, gigi, gusi dan paru-paru.

Terkait tingkat keterpaparan, Zubairi menjelaskan ada tiga jenis tingkat keterpaparan risiko ketika melakukan kontak dengan jenazah Covid-19. Pertama ialah risiko rendah yang mencakup aktivitas dengan kontak minimum pada jenazah seperti prosesi di rumah duka dan juga petugas pemakaman atau kremasi.

Lalu risiko menengah yang mencakup aktivitas memandikan hingga penanganan manual pada jenazah sehingga ada probabilitas bersentuhan dengan cairan dari tubuh jenazah. Terakhir, risiko tinggi termasuk aktivitas yang meliputi autopsi atau prosedur *invasive* termasuk pembalseman yang dapat menghasilkan interaksi langsung dengan cairan pada tubuh jenazah.

Petugas pemakaman termasuk ke dalam risiko rendah kontak langsung dengan jenazah. Namun jika petugas pemakaman tidak mengenakan alat-alat pelindung dengan lengkap maka risiko keterpaparan dapat meningkat.

“Tentu (berisiko tinggi), itu enggak boleh terjadi ya (kekurangan peralatan),” kata Zubairi.

Terkait dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemakaman protap Covid-19, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) TPU Bambu Apus, Koko memastikan bahwa stok alat aman dan terpenuhi.

“Sangat aman (jumlah ketersediaan). Jadi semua protokol kesehatan dilakukan secara ketat dan *alhamdulillah* tidak satupun anggota pemakaman kami yang terkena Covid-19,” kata Koko saat dihubungi melalui telepon, Jumat (29/1/22).

Kesiapan alat juga diamini oleh Husen. Tidak hanya disalurkan dari Pemprov DKI Jakarta, Husen mengatakan, TPU Bambu Apus juga menerima banyak donatur yang mengirimkan alat-alat pelindung diri mulai dari APD, sarung tangan, masker, hingga vitamin dan juga makanan.

Tidak hanya alat yang berlimpah, Adi menegaskan bahwa jenazah korban Covid-19 yang akan dimakamkan di TPU Bambu Apus diterima dalam keadaan peti sudah dilapisi bungkus plastik yang ketat dan erat.

“Karena kebetulan kan dari rumah sakit juga petinya sudah dilapisi pakai plastik tebal. Kami enggak menerima kalau

enggak *wrapping*. Dari ambulans datang akan diperiksa oleh bagian keamanan kami itu ada *wrapping* atau enggak. Kalau enggak akan diminta untuk *wrapping* terlebih dahulu,” jelas Adi.

Meskipun stok alat kini terpenuhi, Adi tidak menampik petugas pemakaman sempat hanya mengenakan jas hujan sebagai pelindung diri ketika stok APD habis dan stok baru belum datang. Menurut dia, kendalanya hanya proses pengiriman barang yang membutuhkan waktu beberapa hari sehingga dalam keadaan darurat petugas pelayanan hanya mengenakan jas hujan.

“Dulu sempat (pakai jas hujan), awal-awal Covid-19-lah, cukup sulit mungkin karena kebutuhannya tinggi toh sampai akhirnya ada beberapa yang mengenakan jas hujan untuk sementara enggak seterusnya. Setelah itu dari pemda pun langsung memberikan APD lengkapnya,” kata Adi.

Terlepas dari alat perlengkapan yang sudah terpenuhi, Zubairi menyetujui bahwa petugas pemakaman perlu diperiksa secara berkala melalui pemeriksaan tes PCR atau tes antigen. Sayangnya, fasilitas ini belum dipenuhi oleh pemerintah setempat.

Menurut Kepala Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Christian Tamora, tes PCR atau antigen hanya dilakukan jika ada indikasi gejala tertentu pada petugas. Sementara untuk asuransi kesehatan para petugas pemakaman bergantung pada BPJS Kesehatan.

“Petugas gali tutup makam atau PJLP kami di-cover BPJS. *Swab* diberlakukan jika terindikasi,” kata Christian saat dihubungi, Jumat (29/1/22).

Husen beryukur tidak ada petugas gali makam di TPU Bambu Apus yang tertular Covid-19. Namun berdasarkan informasi yang ia terima, setidaknya ada lima sampai enam petugas gali kubur di TPU Pondok Ranggon yang sempat terpapar Covid-19.

'Kami Sudah Siap'

Kini kondisi di TPU Bambu Apus dan sejumlah pemakaman Covid-19 lainnya sudah terkendali. Masa-masa krisis pada saat gelombang kedua lalu sudah berlalu. Husen berharap, ia tidak perlu mengulangi kondisi seperti Juni-Agustus 2021 lalu.

"Yah semoga sudah enggak ada lagilah *mbak* Covid-19 sudah berakhir, semoga enggak ada lagi lonjakan jenazah seperti kemarin," kata Husen.

Memang sejak September 2021 hingga Januari 2022 kata Adi, TPU Bambu Apus hanya menerima satu sampai lima jenazah Covid-19. Namun jika terjadi lonjakan dengan risiko terburuk, Adi mengatakan, pihaknya mengatakan selalu siaga untuk melayani.

Masalah kesiapan memang bukan sekadar *lip service* bagi Husen. Ia mengenang bagaimana tahun-tahun sebelumnya, ketika pandemi Covid-19 belum melanda dunia. Ketika itu, saat sore terbit dan ia telah tiba di rumah, Husen dan istri biasa duduk sembari saling bertukar cerita tentang bagaimana hari berjalan. Tapi keadaan tidak lagi sama. Mungkin tidak akan pernah lagi sama.

Pernah suatu hari, ia lupa tanggal persisnya, TPU Bambu Apus menerima 59 jenazah Covid-19 dalam rentang 24 jam. Husen yang sebelumnya bertugas di TPU Pondok Kelapa sejak 1990 mengaku, angka itu adalah angka jenazah tertinggi yang pernah ia makamkan dalam satu hari.

Maka usai jenazah terakhir untuk hari itu tiba, Husen dan kawan-kawannya akan menyiapkan tiga sampai lima lubang makam baru untuk keesokan pagi sebelum beranjak pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIB. Pukul 06.30 WIB esok harinya, mereka kembali berhadap-hadapan langsung dengan maut.

"Pernah baru pulang jam setengah 12 malam. Kami biasanya menyiapkan dulu dua sampai tiga liang lahat untuk besok pagi.

Pokoknya biar besok ada jenazah masuk, kami sudah siap,” ujar Husen.

Tanggal muat 31 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Nyoman Ary Wahyudi
Bisnis Indonesia

Saya wartawan ekonomi bisnis angkatan pandemi, belum banyak pencapaian. Belakangan sedang gandrung untuk menulis laporan tentang perdagangan dan relasi konglomerat yang melatarinya. Di waktu luang, saya sering curi waktu baca buku filsafat, sastra dan sains. Kompetisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Masa Pandemi adalah pembelajaran untuk menulis tentang buruh yang sering dilupakan publik. Banyak belajar dari kompetisi ini untuk membuat berita yang sungguh.

Ironi Industri Kelapa Sawit, Penuh Cuan tapi Minim Jaminan bagi Buruh

Nyoman Ary Wahyudi (Bisnis Indonesia)



Pekerja memanen kelapa sawit di Desa Rangkasbitung Timur, Lebak, Banten, Selasa (22/9 - 2020). ANTARA FOTO / Muhammad Bagus Khoirunas

Ingar-bingar melesatnya harga kelapa sawit belakangan ini ternyata tidak ikut dinikmati buruh yang bekerja di perkebunan. Alih-alih menjadi kaya, mereka masih terperangkap dalam modus kerja buruh lepas yang minim jaminan keselamatan dan ketenagakerjaan.

Amarah Murliana meluap saat manajemen PT BMP Hartono Plantations Indonesia (HPI Agro) batal memberi pesangon sebesar Rp41,5 juta kepada dirinya. Murliana sudah menempuh

sembilan kali mediasi sejak dipecat dari perkebunan sawit milik Grup Djarum itu pada pertengahan tahun lalu.

Adapun nilai pesangon itu hasil perhitungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, setelah mengidentifikasi masa kerja Murliana selama lima tahun delapan bulan di perusahaan perkebunan sawit itu. Kendati demikian, perusahaan sempat melaporkan masa kerja Murliana hanya dua tahun.

Menurut Murliana, anak usaha Grup Djarum itu enggan membayar pesangon lantaran status kerja yang dimilikinya berupa buruh harian lepas atau BHL. Status kerja itu kerap dijumpai di sebagian besar sentra perkebunan sawit yang terbentang dari Sumatera hingga Kalimantan. Belakangan, model kerja itu digunakan perusahaan untuk merekrut pekerja dengan ongkos dan investasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relatif murah.

“Nominal pesangonnya sudah disanggupi, saya datang mediasi tiba-tiba ditolak mentah-mentah sama HRD-nya, sepeser pun tidak ada, saya emosi. Alasannya karena saya buruh harian lepas,” kata Murliana selepas mediasi pekan lalu.

Bahkan Murliana yang juga tergabung dalam serikat buruh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Landak melaporkan perusahaan itu karena turut memutus kerja 100 buruh lain. Alasannya karena jumlah pekerja yang sudah ada melebihi kapasitas produksi.

“Kita ada 100 orang lebih yang di-PHK tanpa sepotong surat, tanpa hak. Bahkan di situ mereka ada yang sudah bekerja dari 2009 saat perusahaan itu berdiri. Alasannya karena buruh harian lepas kebanyakan tidak ada kontrak,” kata dia.

Hubungan kerja yang timpang itu juga terlihat pada absennya fasilitas K3 untuk buruh harian lepas di perkebunan sawit milik perusahaan tersebut. Biasanya kecelakaan kerja yang sering terjadi di perkebunan sawit di antaranya mata terkena buluh

sawit yang dapat menyebabkan kebutaan, tersayat egrek atau alat untuk memotong buah sawit dari pohon, gigitan binatang seperti tersengat tawon dan ular, kecelakaan di jalan dalam proses pengangkutan buah kelapa sawit karena lokasi jalan berlumpur hingga pekerja tercemplung ke dalam lubang hasil penambangan emas ilegal di sekitar perkebunan.

Adapun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat kecelakaan kerja terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2017, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 123.040 kasus. Angka itu mengalami kenaikan pada 2018 menjadi 173.415. Pada 2019 kecelakaan kerja tercatat sebanyak 182.835 dan naik di angka 221.740 pada 2020.

Kecelakaan kerja yang terjadi masih didominasi oleh kecelakaan kerja di area kerja (72,6 persen) diikuti oleh kecelakaan lalu lintas (20,12 persen) dan kecelakaan kerja di luar area kerja sebanyak 7,25 persen.

Absennya fasilitas K3 itu turut diperparah dengan minimnya jaminan sosial yang diterima buruh harian lepas di sejumlah perusahaan sentra sawit. Malahan, buruh harian lepas itu mesti patungan untuk dapat membeli obat bagi rekan mereka yang jatuh sakit atau mengadakan fasilitas K3 secara swadaya.

“Kalau kita kecelakaan kerja kita mungutlah bersama teman-teman kerja, beli obat atau untuk berobat, alat pelindung dirinya masih terbatas begitu semasa saya masih bekerja,” kata dia.

Adapun pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia didominasi oleh perkebunan swasta. Per akhir 2020, luas perkebunan sawit yang dikelola swasta mencapai 8.285.370 Ha (55,76 persen), yang dikelola rakyat seluas 6.003.764 Ha (40,4 persen) dan yang dikelola negara 569.166 Ha (3,83 persen).

Luas lahan perkebunan swasta itu bertambah sebanyak 343.035 Ha (4,31 persen) dibandingkan dengan 2019, sementara lahan perkebunan sawit bertambah 106.989 Ha (1,81 persen). Hanya

saja luas lahan perkebunan negara menciut sebanyak 48.335 Ha (7,82 persen).

Luasnya lahan perkebunan sawit itu belakangan juga turut menyerap jumlah pekerja yang relatif besar di sejumlah daerah. Hingga akhir 2020, terdapat 4.427.273 pekerja yang bekerja di perkebunan sawit swasta dan negara. Sementara petani yang mengelola perkebunan sawit rakyat sebanyak 2.566.066 orang. Dibandingkan 2019, terjadi penambahan 147.350 pekerja (3,44 persen) di perkebunan sawit swasta dan perkebunan sawit rakyat ada penambahan 56.852 petani (2,26 persen).

Dari total 4.427.273 pekerja di perkebunan sawit swasta dan negara, hanya sekitar 29,54 persen yang didaftarkan di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Buruh harian lepas tercatat belum banyak didaftarkan ke program jaminan sosial tersebut bila dibandingkan pekerja tetap di perkebunan.

Adapun buruh harian lepas itu biasanya bekerja di bidang perawatan, pemupukan, penyemprotan insektisida, dan pembrondol (pengutip brondolan sawit). Sebagian besar banyak bersinggungan dengan pestisida yang berpotensi mempengaruhi kesehatan reproduksi buruh perempuan.

Minim Perlindungan

Akses yang minim pada fasilitas K3 dan jaminan sosial itu juga terjadi di sejumlah perusahaan yang terletak di sentra perkebunan sawit yang ada di Provinsi Riau. Buruh harian lepas di bidang pemanenan PT Perdana Inti sawit Perkasa 2, Sudirman, menuturkan hak-hak pekerja masih belum dipenuhi oleh perusahaan.

Misalnya kata Sudirman, perusahaan belum kunjung memberikan alat pelindung diri (APD) dan alat pelindung kerja (APK) kepada buruh yang bekerja di perkebunan. Sementara kata Sudirman, kecelakaan sering menimpa buruh yang bekerja pada sektor tersebut.

“Ada juga teman yang mengalami kebutaan karena tidak ada pelindung, APD sama sekali minim, tidak ada yang diberikan perusahaan, sawit ini kan sudah tinggi seharusnya dikasi kacamata atau helm,” kata Sudirman.

Adapun Sudirman sudah bekerja untuk PT Perdana Inti Sawit Perkasa 2 sejak 2017. Hingga awal tahun ini, dia mengatakan dirinya tetap berstatus sebagai buruh harian lepas atau tidak ada kabar pengangkatan sebagai pekerja tetap.

Dia menuturkan dirinya sulit untuk mengakses informasi berkaitan dengan kontrak dan target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Konsekuensinya, kata dia, pendapatan yang diperoleh buruh tidak optimal atau di bawah ketentuan upah minimum. Dia menyinyalir perusahaan sengaja menaikkan target kerja dengan sistem tertutup agar pendapatan buruh dapat ditekan.

“Hasil kerja setiap bulan tidak pernah jelas perhitungannya karena di sini pakai sistem sementara kami tidak tahu bagaimana sistemnya tidak pernah dikomunikasikan,” kata dia.

Ketua Umum Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Herwin Nasution menilai negatif modus perusahaan perkebunan sawit yang masih merekrut tenaga kerja dengan status buruh harian lepas tersebut. Menurut Herwin, manuver itu dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan mereka dengan mengorbankan keselamatan buruh.

“Mereka tidak mendapat hak dari Undang Undang Ketenagakerjaan, buruh membeli sendiri APD dan APK. Ketika kecelakaan karena tidak terdaftar BPJS mereka akhirnya biaya sendiri bahkan yang buruh meninggal tidak mendapat apa-apa,” kata Herwin.

Dengan demikian Herwin menegaskan, buruh harian lepas pada perkebunan sawit itu tidak memiliki masa depan yang jelas. Apalagi perusahaan cenderung memperpanjang masa kerja

buruh harian lepas itu tanpa adanya kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap.

Menurut Herwin, Kementerian Ketenagakerjaan luput untuk memberi perhatian pada isu keselamatan dan kesejahteraan buruh di perkebunan sawit. Dia mengakui lokasi perkebunan yang terpencil sering kali menjadi hambatan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Di sisi lain, buruh harian lepas sudah terlanjur terisolasi dalam kawasan perkebunan itu.

“Mereka terisolasi, akhirnya terjadi perbudakan dan eksploitasi terus menerus. Kalau ditanya bagaimana kehidupan mereka? Ya tidak layak bahkan terjadi perbudakan modern,” tuturnya.

Menanggapi laporan itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap mengatakan, kementeriannya bakal menindaklanjuti permasalahan ketenagakerjaan yang masih berlangsung di perkebunan kelapa sawit.

Chairul menegaskan kementeriannya tengah berfokus untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan amanat UU Ketenagakerjaan.

“Kemenaker mempunyai perhatian khusus untuk memastikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan kesejahteraannya termasuk pekerja harian lepas yang ada,” kata Chairul.

Kemenaker kata Chairul, terus mendorong perusahaan untuk mematuhi norma ketenagakerjaan termasuk pemenuhan K3 yang dilakukan melalui pembinaan dan pemeriksaan di lapangan.

“BPJS juga menjadi prioritas Kemenaker untuk diberikan kepada setiap pekerja atau buruh di perkebunan kelapa sawit yang jumlahnya cukup banyak dan memiliki karakteristik hubungan kerja yang beragam,” kata dia.

Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumarjono Saragih mengakui letak perkebunan sawit yang relatif terpelosok cenderung menyulitkan upaya pengawasan implementasi K3 dan jaminan sosial berjalan efektif.

Kendati demikian, Sumarjono memastikan asosiasinya terus mendorong perusahaan sawit untuk berinvestasi lebih intensif pada ranah K3 dan kesejahteraan buruh di perkebunan. Dengan investasi itu, Sumarjono mengatakan perusahaan dapat menekan biaya kecelakaan sembari meningkatkan produktivitas perseroan.

“Cara pandang seperti ini terus kita bangun sebagai bagian dari investasi ketika suatu perusahaan bangun kebun dia harus sudah hitung investasinya untuk manajemen K3 sebagai bagian dari proses bisnis,” kata Sumarjono.

Malahan dia mengatakan investasi pada aspek manajemen K3 itu setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun hingga awal tahun ini, 50 persen dari 708 perusahaan anggota GAPKI sudah memenuhi standar *Indonesia Sustainable Palm Oil System* (ISPO).

Dengan demikian dia mengatakan, permasalahan terkait dengan perlindungan kerja dan jaminan sosial buruh harian lepas itu seharusnya tidak terjadi pada perusahaan anggota GAPKI. Malahan dia menyinyalir polemik itu terletak pada rantai pasok petani yang turut mengajak buruh sebagai pembantu mereka di perkebunan.

“Dari analisis kita itu ada di rantai pasok petani kekurangannya, petani itu kan banyak buruh-buruhnya. Petani juga harus didorong supaya buruh-buruh yang dipekerjakan di kebunnya harus mendapatkan perlindungan,” kata dia.

Serupa, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B.Sukamdani menilai, pengawasan terhadap implementasi manajemen K3 sulit dilakukan untuk menjangkau

perusahaan-perusahaan kecil di daerah terpelosok.

“Kita tidak bisa tahu juga ya karena mata rantainya banyak kalau dia plasma di perkebunan yang relatif bukan milik korporasi, susah kita ngomongnya ya,” kata Hariyadi.

Kendati demikian, Hariyadi tidak menampik sejumlah perusahaan memang tidak mengikuti amanat perlindungan terhadap pekerja mereka di perkebunan sawit tersebut. Dengan demikian, dia meminta, pemerintah mengintensifkan pengawasan implementasi K3 dan jaminan sosial di kawasan perkebunan sawit ke depan.

Di sisi lain, dia mengakui investasi pada aspek manajemen K3 di perkebunan sawit masih terbilang rendah. Nilai investasi K3 untuk perkebunan sawit masih tertinggal jauh dengan industri lainnya seperti manufaktur dan pengolahan minyak dan gas.

“Kalau di perkebunan itu tidak terlalu berisiko, yang berisiko itu manufaktur kalau kita bicara risiko kerja. Standar K3 memang tergantung sektor kerjanya,” kata dia.

Tanggal muat 31 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Muhamad Taslim Dalma

Zonasultra.com

Muhamad Taslim Dalma. Pria kelahiran Muna ini menyelesaikan studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Halu Oleo pada tahun 2018. Mulai menjajaki dunia jurnalistik sejak tahun 2014 sebagai jurnalis di koran Media Sultra. Pada tahun 2015 sampai sekarang ia bekerja di media online ZonaSultra.com dengan posisi saat ini sebagai redaktur pelaksana. Pria yang akrab disapa “Icon” ini pernah menerima berbagai penghargaan kompetisi jurnalistik dan beasiswa liputan.

Kompetisi yang pernah dimenangkannya adalah juara 5 Lomba Jurnalistik Anugerah Indonesia Damai 2019, juara 3 lomba Kreasi Pewarta Anak Bangsa (KPAB) 2021, dan juara 1 Lomba Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2021. Sementara beasiswa liputan yang pernah didapatnya yaitu Meliput Isu Lingkungan 2015, Sains dan Pangan 2019, Jurnalisme Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19, Perlindungan Anak dan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19, Jaminan Sosial Nasional di Masa Pandemi Covid-19, Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020, serta Jurnalisme dan Trauma 2021.

Saat ini Icon aktif sebagai anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari dan Anggota Society of Indonesian Science Journalists (SISJ). Karya jurnalistiknya pernah diterbitkan dalam buku “Cerita di Balik Pandemi”, dan “Jalan Panjang Menuju Sejahtera”. Pada 2022 ini, ia dinyatakan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Madya yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

Saya senang bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ketika awal merencanakan liputan “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di masa Pandemi Covid-19” saya agak kesulitan menentukan topik karena memang isu ini jarang diangkat oleh media. Saya kemudian terpikir bahwa nelayan adalah salah satu pekerjaan dengan risiko tinggi yang memiliki peran utama dalam penyediaan ikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali di kala pandemi terjadi. Saya bertemu dengan beberapa nelayan kecil yang memang abai terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah menyelesaikan liputan, saya berkesimpulan bahwa isu seperti ini penting untuk terus diangkat menjadi berita, sehingga dapat menjadi perhatian berbagai pihak terkait.

Risiko Kerja Tinggi, Pentingnya Aspek Kesehatan dan Keselamatan bagi Nelayan di Sultra

Muhamad Taslim Dalma (Zonasultra.com)



Kapal Motor Nelayan (KMN) Bunga Kacang usai membongkar muatan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Selasa (11/1/2022). (Muhamad Taslim Dalma/ZONASULTRA.COM)

Matahari bersinar cerah di pagi 11 Januari 2022 lalu, menerangi aktivitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapal-kapal penangkap ikan berjejer di pinggir dermaga.

Setiap kapal sedang menurunkan hasil tangkapannya setelah berhari-hari di laut lepas, salah satunya Kapal Motor Nelayan (KMN) Bunga Kacang yang berukuran 28 gross ton (GT). Para anak buah kapal (ABK) itu tampak cekatan menyortir ikan berupa cakalang, layang, dan tongkol yang baru saja dikeluarkan dari palka.

Sekitar dua ton tangkapan itu merupakan hasil jerih payah sang Kapten Kapal Abdul Aziz (36) bersama 20 ABK. Mereka selama 7 hari berada di lautan lepas dengan rute Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari-Laut Banda. Selama mengarungi lautan menghadapi cuaca buruk sudah dianggap hal yang biasa.

Selama dua tahun menggunakan kapal itu, Aziz dan para ABK-nya yang berusia 18 tahun hingga 50 tahun selalu aman. Mereka belum pernah mengalami kecelakaan laut. Salah satu kuncinya adalah peralatan keselamatan yang lengkap mulai dari parasut jangkar, sampan, baju pelambung, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tabung pemadam api, *radio single side band* (SSB) hingga *global positioning system* (GPS).

Bagi Aziz, penggunaan alat-alat itu sangat penting agar semua anggotanya aman dalam perjalanan yang penuh risiko. Misalnya, ada yang terluka akibat terkena mata pancing maka peralatan dalam kotak P3K selalu jadi andalan.



Kolase foto ketika Abdul Aziz menunjukkan alat-alat keselamatan di KMN Bunga Kacang.

“Parasut yang paling pokok itu. Kalau ombak-ombak lima meter dan cuaca buruk itu tidak bisa kita tempuh makanya tinggal pasang parasut, jadi kapal bagus goyangnya. Kita juga bisa santai meski ada hantaman ombak,” ujar Aziz sambil menunjukkan alat-alat keselamatan di kapal mereka.

Untuk masalah kesehatan yang biasanya mereka alami adalah sakit perut karena masuk angin, demam dan sakit kepala. Hal seperti ini diatasi dengan obat-obatan yang ada dalam kotak P3K salah satunya adalah jenis obat paratusin.

Selain itu mereka juga memiliki perbekalan berupa beras dan sayur-sayuran yang cukup sebagai persediaan berada di laut. Perbekalan itu dengan perkiraan untuk 10 hari termasuk ada kompor dan tabung gas. Bila tidak cukup maka biasanya Aziz menerima bantuan dari nelayan kapal lain dan begitu pula sebaliknya, nelayan lain yang minta bantuan karena kehabisan.

Solidaritas sesama nelayan itu juga berguna apabila terjadi kecelakaan atau ada masalah dengan kapal. Melalui alat komunikasi, kapal terdekat bisa saling menolong. Begitu pula bila ada cuaca buruk, informasi akan disebarakan oleh nelayan ke nelayan lain melalui radio SSB.

Terkait pandemi Covid-19 menurut Aziz, pekerjaan mereka tidak begitu terpengaruh. Sebagai nelayan, 70 persen waktu mereka di laut sehingga jarang berinteraksi dengan khalayak ramai. Tapi dia menekankan pentingnya vaksinasi. Kini dirinya dan semua anggotanya sudah divaksin lengkap dua dosis.

Segala perlengkapan di kapal yang digunakan Aziz itu disediakan oleh Intan (36) bersama suaminya sebagai pemilik kapal. Perlengkapan alat-alat keselamatan, asuransi bagi ABK dan kelengkapan lainnya harus siap agar mendapatkan izin berlayar dari Syahbandar PPS Kendari.

“Pokoknya kita sebagai pemilik kapal menyiapkan dana, apa yang dipersyaratkan semua kita lengkapi. Tidak dikasih keluar

ini kapal kalau tidak lengkap,” ujar Intan yang sementara mendata hasil tangkapan ikan kapal tersebut.

Berdasarkan data 2021, total nelayan di PPS Kendari berjumlah 5.640 orang dengan jumlah kapal 378 unit yang berukuran 10 hingga 30 GT lebih. Sama seperti Aziz, nelayan lainnya yang ada di PPS Kendari juga aman melaut. Dalam 5 tahun terakhir, PPS Kendari mencatat nihil kecelakaan laut.

Para nelayan ini juga mampu bekerja dengan optimal. Hasil tangkapan mereka melampaui target tangkapan ikan. Selama 2021, hasil tangkapan nelayan PPS Kendari mencapai 16.653 ton, lebih dari target 15.500 ton.

Humas PPS Kendari Arifin mengatakan, standar keamanan dan keselamatan berlayar memang diterapkan dengan ketat ketika nelayan mengurus penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) bagi kapal perikanan. Petugas Syahbandar PPS Kendari selalu melakukan inspeksi tentang kelayakan kapal sebelum terbit SPB. “Kalau kecelakaan kerja laut yang SPB-nya terbit di sini selalu tidak ada. Yang ada nelayan itu meninggal di laut karena penyakit bawaan seperti sakit jantung,” ucap Arifin di ruang kerjanya, Selasa (11/1/2022).

Selain itu, pihak Syahbandar PPS juga memastikan para ABK mendapat asuransi yang preminya dibayarkan oleh pemilik kapal. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan kerja dan sebagai upaya perlindungan nelayan.

Sementara itu, kapal yang tak perlu memiliki surat izin berlayar adalah kapal di bawah 10 GT yang biasanya dimiliki nelayan tradisional. Kapal-kapal inilah yang sering mengalami kecelakaan laut. Berdasarkan data kecelakaan 2021, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari menangani 49 kecelakaan kapal. Beberapa kecelakaan dialami oleh nelayan yang menggunakan *long boat* (perahu).

Dari data tersebut, terdapat lima musibah nelayan hilang karena

kecelakaan kapal selama 2021 yakni di Perairan Pulau Batu Atas, Buton Selatan dan di Perairan Lasalimu, Buton pada Januari; di Perairan Desa Maohi, Buton Utara pada bulan Maret; di Perairan Pulau Padamarang, Kolaka pada bulan April; di Perairan Bahari, Buton Selatan pada bulan Mei serta di Perairan Batu Atas, Buton Selatan pada bulan Oktober.

Perlindungan Nelayan

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), nelayan di Sultra selama 2021 berjumlah 76.035 orang. Mereka terdiri dari nelayan tanpa perahu (NTP) 1.390, nelayan dengan perahu tanpa motor 14.176, nelayan yang menggunakan kapal motor 27.099 dan nelayan motor tempel 33.370.

Untuk perlindungan para nelayan tersebut, yang didorong oleh pemerintah adalah asuransi khusus nelayan sebagai jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Sejak 2016, pemerintah pusat memberikan bantuan dengan menanggung premi asuransi untuk satu tahun pertama, yang setelah itu harus dilanjutkan nelayan untuk pembayaran preminya.

Namun kuota bantuan itu terbatas setiap tahunnya. Hanya segelintir nelayan yang mendapatkannya. Selain itu banyak nelayan yang tidak melanjutkan asuransi secara mandiri sehingga ketika terjadi kecelakaan di laut maka tidak dapat mengklaim manfaat asuransi.

“Beberapa sudah dapatkan manfaat asuransi. Jadi sebenarnya beberapa masyarakat sudah melihat manfaat itu tapi persoalannya kesadaran dari nelayannya. Pas selesai dibayarkan preminya oleh pemerintah tak dilanjutkan oleh masyarakat,” jelas Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sultra, Yenni Buraera di ruang kerjanya, Jumat (14/1/2022).

Dari Pemerintah Provinsi Sultra, bantuan untuk nelayan adalah alat tangkap. Bantuan biasanya disesuaikan dengan permintaan

dari kelompok nelayan yang mengusulkan bantuan dalam bentuk proposal.

Bantuan yang disalurkan ke nelayan biasanya berupa alat pancing, rumpon, jaring, umpan dan bubu. Terkait alat kesehatan dan keselamatan kerja tidak ada yang mengusulkan. Begitu pula saat sosialisasi, yang sering dilakukan DKP adalah tentang pentingnya asuransi bagi nelayan.

Salah satu nelayan di Kelurahan Bungkutoko, Kota Kendari yang yang tak mendapat bantuan pemerintah untuk pembayaran premi asuransi adalah Arifin (41). Meski begitu, dia tetap mengikuti asuransi secara mandiri.

Dia adalah nelayan pemancing yang selama 5 tahun ini beroperasi di Perairan Pulau Hari, Konawe Selatan. Jarak antara rumahnya dan perairan itu hanya sekitar 15 kilometer. Dengan perahu miliknya, dia kadang berangkat sore pulang sore dan berangkat pagi pulang pagi. Dalam sebulan, dia bisa enam hingga tujuh kali keluar melaut hanya seorang diri.

Meski tak pernah mengalami kecelakaan laut, dia tertarik untuk ikut asuransi BPJS Ketenagakerjaan setelah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Dia memahami pentingnya jaminan sosial karena pekerjaan yang digelutinya memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja.

“Sejak tahun lalu (2021) saya bayar terus, per bulan kena Rp38 ribu. Jadi kalau kita kecelakaan atau kena musibah saat turun, kita ditanggung. Pokoknya kalau kita mau berobat di Jakarta, katanya, kita ditanggung sewanya,” ucap Arifin di rumahnya, Selasa (25/1/2022).

Dia juga senang mengikuti asuransi karena dalam premi yang dibayarnya sudah termasuk jaminan hari tua (JHT) yang berfungsi seperti tabungan. Hanya satu yang dikeluhkannya, dia harus bolak-balik membayar premi setiap bulan sementara ada kegiatan lain yang harus dikerjakannya.



Salah satu nelayan, Arifin memperlihatkan baju pelampung di perahunya.

Terkait peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di kapalnya, Arifin mengaku enggan membelinya dengan uang pribadi. Alat keselamatan yang dimilikinya saat ini seperti dua buah rompi pelampung merupakan alat kelengkapan ketika menerima bantuan satu unit perahu dari pemerintah.

“Kalau sebelumnya biasa hanya andalkan jeriken untuk pelampung. Tidak ada nelayan di sini yang mau beli sendiri baju pelampung. Kenapa kita mau beli yang *begituan*, mending kita belikan bahan bakar,” ujar Arifin yang tampak senang memegang rompi pelampung miliknya.

Dia dan sejumlah nelayan lainnya di Bungkutoko pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya menggunakan *radio single side band* (SSB) sebagai alat komunikasi dan keselamatan. Radio ini berguna di wilayah yang tak terjangkau jaringan seluler.

Namun, pengenalan itu tidak disertai bantuan perangkat radio SSB sehingga nelayan setempat belum ada yang menggunakannya. Arifin dan nelayan lainnya saat ini hanya

mengandalkan ponsel genggam untuk alat komunikasi dengan kendala kehilangan jaringan seluler dan kehabisan daya baterai.

Masalah dan Solusi bagi Nelayan

Peneliti Pengelolaan Perikanan dari Universitas Halu Oleo (UHO), Ahmad Mustafa menjelaskan kejadian nelayan hilang memang paling sering terjadi dan bisa saja lebih dari data Kantor Pencarian dan Pertolongan. Berbeda dengan kapal yang memiliki surat izin berlayar, kapal kecil lebih bebas dan tak diawasi sehingga abai terhadap standar keselamatan.



Ahmad Mustafa

Persoalan standar keselamatan ini lanjut dia, juga ada kaitannya dengan kesadaran nelayan yang mana nelayan enggan mengeluarkan uang. Dari pada membeli alat-alat keselamatan, mereka lebih memilih menggunakan alat seadanya, seperti jeriken air dan bahan bakar untuk dijadikan pelampung.

Kepala Laboratorium Teknologi Penangkapan Ikan UHO ini mencontohkan nelayan pancing tonda (pemancing tuna) dari Kepulauan Buton yang memiliki wilayah penangkapan hingga ke Flores. Mereka berlayar sendiri-sendiri dengan perahu (ukuran 1 hingga 2 GT) tanpa standar keselamatan yang memadai.

“Tuna ini kan tidak ada di laut dangkal, pasti di laut dalam. Jadi kalau nelayan ini kemungkinan tenggelam karena ombak besar hingga terbawa arus apalagi peralatan keselamatan tidak lengkap dan jauh daerah penangkapannya,” ucap Ahmad di ruang kerjanya, Senin (24/1/2022).

Kecelakaan yang juga sering terjadi pada nelayan pancing tonda yaitu cedera tangan atau bagian tubuh lain dan terjatuh ke laut akibat tarik menarik dengan ikan tuna besar. Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, peralatan kesehatan dan keselamatan yang standar sangat dibutuhkan tapi nelayan tak memilikinya.

Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di daerah-daerah sebagai akademisi, Ahmad juga biasa mendapat informasi tentang maraknya nelayan yang menggunakan bom ikan. Hal ini dilakukan oleh nelayan-nelayan penangkap ikan karang. Cara seperti ini selain membahayakan si nelayan juga merusak terumbu karang.

Saat terjadi kecelakaan pada penggunaan bom ikan ini maka disembunyikan oleh pihak keluarga nelayan karena praktik seperti itu ilegal. Terkecuali kata Ahmad, korbannya sudah sangat parah maka dibawa ke rumah sakit dengan tetap merahasiakan penyebab sakit.

“Alasannya mereka gunakan bom ya sudah jelas karena tidak ada cara paling mudah selain itu. Mereka tahu kalau itu dilarang, jadi kalau ada yang sampai meninggal dunia maka dirahasiakan oleh keluarganya dan tidak disebarluaskan,” ucap Ahmad yang bergelar Master Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dari Universitas Hasanuddin.

Kegiatan lainnya yang juga membahayakan adalah penggunaan kompresor pompa ban di kalangan nelayan untuk menyelam. Pelarangan kompresor untuk penangkapan ikan sudah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ahmad mengamati penggunaan kompresor ini banyak di daerah-

daerah perkampungan yang pengawasannya tidak ketat. Selain kompresor digunakan untuk *illegal fishing* (menangkap dengan ilegal seperti pakai obat bius) juga berbahaya secara kesehatan. Udara dari kompresor tidak ada penyangringnya sehingga asap dari cerobong mesin perahu turut tersedot oleh kompresor.

“Nelayan kita yang gunakan kompresor ini juga tidak mengetahui bahwa tubuh ini perlu penyesuaian ketika menyelam pada tekanan tinggi dan keluar dari tekanan tinggi, sehingga muncul masalah kesehatan akibat penyelaman,” ucap Ahmad.

Hal lain juga adalah kadang-kadang nelayan kurang memperhatikan pola hidup yang sehat dan kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Ahmad menjelaskan nelayan yang selalu beraktivitas di malam hari adalah pekerjaan yang menguras secara fisik dan rawan terkena berbagai masalah kesehatan, berbeda dengan jenis pekerjaan lain yang secara teratur beraktivitas pada siang hari.

Ahmad mengungkapkan masalah bagi nelayan juga saat ini adalah adanya perubahan iklim (*climate change*) sehingga terjadi cuaca ekstrem dengan adanya gelombang di luar kebiasaan. Hal ini membuat pekerjaan nelayan makin berisiko.

“Mereka biasa saja dengan kondisi alam, jadi ketika mendapat kejadian yang luar biasa karena perubahan iklim, mereka tidak siap dan jadi korban. Makanya salah satu efek perubahan iklim ini adalah tingginya kecelakaan di laut,” tutur Ahmad.

Terkait pandemi Covid-19, Ahmad menilai tak begitu berpengaruh dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja nelayan di Sultra. Pengaruhnya justru pada sektor perekonomian nelayan pada komoditas ekspor.

“Misalnya di Tiworo (Kabupaten Muna Barat) sana orang menangkap rajungan mungkin tidak ada hambatan. Tapi ketika dia pergi jual, pembeli yang batasi, otomatis jatuh harga hingga mempengaruhi pendapatan nelayan,” ujarnya.

Dari berbagai persoalan yang ada, Ahmad mengemukakan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Menurutnya pemerintah dapat melakukan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan karena faktanya banyak kasus nelayan hilang.

Kemudian selain Dinas Perikanan, instansi lain juga bisa membantu nelayan. Misalnya pemerintah dapat merekomendasikan agar *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan tertentu digunakan untuk membantu nelayan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.

Ahmad juga menyebut pentingnya pembuatan pangkalan-pangkalan khusus bagi nelayan di seluruh wilayah. Sebab arah pengelolaan sumber daya perikanan adalah nelayan harus berbasis di tempat pendaratan ikan atau pangkalan.

Konsep pangkalan ini dapat dibuat seperti pelabuhan pada umumnya dengan penyediaan sarana-prasarana kebutuhan nelayan sehingga nelayan tertarik untuk datang. Kata dia, memang saat ini sudah ada beberapa pangkalan bagi nelayan tapi karena tidak didukung sarana dan prasana penunjang yang memadai sehingga ditinggalkan atau sepi.

“Supaya segala hal tentang nelayan itu bisa diatur dari situ (pangkalan) termasuk informasi tentang pasar, hasil tangkapan, cuaca dan lainnya. Kalau di luar negeri kan begitu, semua nelayan yang melaut setiap hari itu tercatat, bahkan di mana dia melaut, apa yang dia tangkap dan apa alat tangkapnya terekam,” ujar Ahmad.

Ahmad juga menekankan pentingnya jaminan sosial bagi nelayan karena risiko pekerjaan yang tinggi. Berkaca pada negara-negara yang maju pengelolaan perikanannya, jaminan sosial adalah sesuatu hal yang umum.

Hanya tentu kata Ahmad di Indonesia masih banyak kendala. Kesadaran nelayan tentang perlunya jaminan sosial masih rendah karena kurangnya pemahaman dan masih dipandang sebagai sumber pengeluaran.

“Nelayan hanya senang pada bantuan langsung tanpa pengembalian. Begitu juga lembaga-lembaga asuransi yang masih enggan melirik kepada asuransi nelayan,” ujar Ahmad.

Jadi lanjut Ahmad, apa yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dari program asuransi nelayan semestinya dievaluasi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan baik sistem maupun kelembagaannya tanpa harus dihentikan.

Tanggal muat 31 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Iwan Arifianto
Tribunjateng.com

Saya Iwan, Jurnalis dari media lokal, Tribun Jateng. Mengampu Desk Kriminal dan Grass Root. Setiap hari berkecimpung di berita-berita kriminal maupun kejadian seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan lainnya. Namun, di sela-sela liputan tersebut tertarik mengangkat isu-isu sosial di antaranya pentingnya penerapan K3 bagi buruh. Selain itu, konsen pula dalam pemberitaan kesetaraan gender, kekerasan seksual dan lainnya.

Kesan saya mengikuti kompetisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Masa Pandemi COVID-19, tentu menambah wawasan lebih terkait isu K3. Sebab, dalam kompetisi ini kita harus melakukan riset yang lebih mendalam terkait K3 dan melihat di lapangan sejauh mana penerapannya.

Semoga para jurnalis terus mengaungkan isu K3 tidak hanya melalui kompetisi saja.

Cerita Ardian Pasien Kanker Payudara Rasakan Manfaat Penerapan K3 saat Kebakaran Rumah Sakit Kariadi Semarang

Iwan Arifianto (Tribunjateng.com)



Karyawan RSUP Dr. Kariadi Semarang saat melakukan pelatihan rutin K3 kebakaran meliputi cara memadamkan api, evakuasi pasien, dokumen, dan lainnya, di Kota Semarang, Kamis (27/1/2022).

Seorang perempuan pengidap kanker payudara, Ardian, petang itu sedang mengantre di ruang terapi sinar kanker gedung Kasuari RSUP Dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah.

Di sela menunggu antrean, ia menyempatkan salat Magrib di musala gedung tersebut. Selepas itu ia kembali mengantre.

Tak berselang lama, sekira pukul 18.30 WIB, alarm kebakaran berbunyi keras. Ia sontak kaget. Tak hanya dirinya namun beberapa pasien kanker di gedung itu juga mengalami hal yang serupa.

“Saya melihat ruang MRI tak jauh dari tempat saya mengantre keluar kepulan asap putih,” terang warga asal Kudus itu kepada *Tribunjateng.com*.

Ia yang ketika memeriksakan diri ditemani seorang rekannya bernama Rahma sempat panik.

Sepersekian detik ia kebingungan, kondisi itu tak jauh berbeda dari beberapa pasien di dekatnya.

Di tengah kebingungan itu, sejumlah petugas rumah sakit menyuruhnya untuk segera meninggalkan gedung sembari memintanya untuk tetap tenang.

“Ada petugas laki-laki memakai helm biru bertuliskan ‘Koordinasi Pasien’, ia meminta kami para pasien rumah sakit meninggalkan gedung dengan tenang,” jelasnya.

Ia pun bersama belasan pasien lain meninggalkan gedung itu. Sepanjang pengamatannya, tampak petugas rumah sakit yang berseliweran.

Mereka bergerak cepat terutama saat mengevakuasi pasien kemoterapi di gedung tersebut.

Tampak puluhan pasien kemoterapi dievakuasi dengan susah payah oleh petugas.

“Ya saya kasihan kepada pasien kemoterapi yang dievakuasi dengan cepat oleh petugas dengan selang infus yang masih menempel di badan,” ucapnya.

Di sudut lain, ia melihat para perawat dan sejumlah satpam berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR) dan tabung hidran.

Beberapa petugas lain tampak membawa alat-alat rumah sakit seperti komputer dan dokumen.

Proses evakuasi dan usaha memadamkan api kian mencekam lantaran di luar gedung terjadi hujan deras disertai angin kencang.

“Setelah itu saya menjauh dari gedung, tak berselang lama api semakin besar yang disusul banyak truk pemadam kebakaran dan puluhan ambulans untuk mengevakuasi pasien ke gedung lain,” katanya.

Selepas petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama kurang lebih satu jam, akhirnya api dapat dipadamkan.

Diakuinya, ketika kejadian sempat diselimuti rasa takut. Namun demikian, gerak cepat petugas rumah sakit dalam melakukan penanganan kebakaran membuatnya merasa lebih tenang.

Menurutnya, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di rumah sakit tersebut sudah berjalan dengan baik. Ardian mengaku, setelah kejadian itu tak alami rasa trauma.

“Saya sudah lima kali terapi di sini. Dari kejadian ini berarti pihak rumah sakit sudah punya SOP K3 yang bagus saat menghadapi kejadian tak terduga seperti kebakaran. Mereka sudah bergerak taktis, terorganisasi, tenang dan alarm maupun peralatan yang di gedung itu berfungsi baik meski tak mampu menangani besarnya api,” ungkapnya.

Peristiwa kebakaran yang diceritakan pasien kanker Ardian itu terjadi saat gedung Kasuari RSUP Dr. Kariadi terbakar di penghujung tahun kemarin, Kamis (30/12/2021) sekira pukul 18.30.

Gedung itu berada paling depan sisi utara rumah sakit yang berhadapan langsung dengan kantor Polrestabes Semarang.

Kebakaran terjadi lantaran korsleting listrik di stop-kontak listrik yang menghubungkan ke alat *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)

Hal itu ditegaskan Kabid Labfor Polda Jateng, Kombes Slamet Iswanto selepas melakukan olah tempat kejadian perkara, Jumat (31/12/2021).

Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Semarang, drg. Farichah Hanum mengklaim, pihak rumah sakit telah bertindak dengan cepat dengan melakukan evakuasi pasien, dokumen penting dan alat-alat penting.

Selain itu kata dia, saluran komunikasi berjalan baik dan dilakukan dengan cepat serta jalur evakuasi juga dapat difungsikan dengan baik.

“Sistem penanganan kebakaran berjalan baik dan kami juga bergerak cepat tentunya atas dukungan dari Damkar dan Polrestabes Semarang,” terangnya.

Hal itu juga ditunjukkan dengan penanganan api yang tidak meluas dan bisa dilokalisasi di ruang MRI saja.

Ditambah sebanyak 50 pasien Onkologi di instalasi Kasuari sudah dapat dievakuasi dengan cepat.

Puluhan pasien itu dipindahkan ke instalasi Garuda.

“Alat pemadam, alarm, hidran fungsi semua. Petugas juga bergerak cepat sesuai tugas masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu anggota Sub Komite K3 RSUP Kariadi Semarang, Titis Nuruttaqi Bintarosyana menegaskan, peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Kasuari menjadi bukti bagi pihak rumah sakit yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) lebih baik.

Sebelum kejadian kebakaran di gedung itu, di RSUP Dr Kariadi memang pernah terjadi kebakaran namun hanya skala kecil yang mampu ditanggulangi oleh karyawan.

“Itu pun sudah lama dan jarang sekali, semisal kami pernah tangani kejadian kebakaran kecil berupa sampah di lingkungan rumah sakit terbakar saat musim panas,” ujarnya Kamis (27/1/2022).

Dari kejadian itu, ia melihat penerapan K3 sudah dilakukan oleh karyawan di gedung tersebut mulai dari proses pemadaman api, petugas evakuasi dan lainnya.

Hanya saja terdapat kendala di lapangan berupa peralatan dan sistem kelistrikan yang banyak sekali di ruangan yang menjadi titik awal sumber api.

Akibatnya, karyawan yang bertugas di bagian pemadam api kesulitan menjinakkan api dengan menggunakan peralatan APAR.

Meski telah menggunakan empat APAR dan menyemprotkan hidran, api belum dapat dipadamkan sehingga pihaknya meminta bantuan dari Damkar Kota Semarang.

“Meskipun standar prosedur operasional sudah berjalan dengan baik, dari kejadian itu kami melakukan evaluasi,” ucapnya.

Evaluasi yang dilakukan berupa karyawan harus menyadari terhadap pentingnya peralatan seperti sistem kelistrikan yang aman dan sebaliknya.

“Dulu K3 kami hanya patroli melihat keselamatan dan keamanannya. Selepas kejadian itu kami galakkan program kerja baru berupa *fire safety patrol*,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program itu lebih menitikberatkan potensi-potensi bahaya kebakaran di unit kerja.

Setiap unit kerja yang melakukan *safe assessment* nantinya akan dilakukan validasi.

“Sarana dan prasarananya yang lebih kita jaga sehingga ketika ada alat seperti kabel sudah aus harus segera diganti,” tuturnya. Selain itu, pihaknya rutin melakukan pelatihan K3.

Pemberian pelatihan K3 di RSUP Dr Kariadi dilakukan secara intensif di gedung masing-masing.

Di rumah sakit milik pemerintah itu, terdapat 15 gedung dan 19 ruang instalansi.

Tiap gedung memiliki jadwal pelatihan tersendiri dengan setiap pelatihan melibatkan 70 persen peserta dari karyawan di gedung tersebut.

Sisanya 30 persen peserta perwakilan instalasi masing-masing.

“Jadi misal pelatihan di gedung Garuda maka 70 persen peserta pelatihan pegawai gedung Garuda. Sisanya perwakilan dari petugas di ruang instalansi,” ujarnya.

Pelatihan dilakukan minimal sebanyak tiga kali dalam setahun. Satu kali dilakukan secara internal, sisanya bekerja sama dengan pihak Damkar maupun Kepolisian dan pihak lainnya.

“Semua pegawai rumah sakit harus teredukasi terkait K3. Mereka juga harus memiliki sertifikat K3 di antaranya penanggulangan kebakaran yang harus diperbarui setiap satu tahun sekali,” bebernya.

Dalam pemberian pelatihan K3, ia menyebut ada dua materi yang diberikan yaitu penanganan dan pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) dan penanggulangan kebakaran.

Untuk B3 meliputi cara pengelolaan, penyimpanan, menangani tumpahan dan penggunaan.

“Di sini banyak bahan-bahan berbahaya seperti radioaktif, obat-obatan jenis sitostatika yang perlu penanganan khusus,” ungkapnya.

Sedangkan penanggulangan kebakaran dibagi menjadi beberapa sub-tugas seperti tugas orang yang pertama kali melihat api, petugas evakuasi, hingga cara penanganan kebakaran. Dalam hal ini ditekankan cara menggunakan APAR dan mengevakuasi korban.

“Empat hal itu yang kami tekankan kepada para karyawan untuk penanggulangan kebakaran,” tuturnya.

Di samping itu, rumah sakit juga dilengkapi sistem sarana proteksi aktif dan pasif.

Proteksi aktif berarti di setiap gedung sudah ada hidran baik *indoor* maupun *outdoor*. Ada pula alarm, detektor, APAR berbagai jenis dan lainnya.

Kemudian papan *record* yang diperbarui setiap pergantian sif.

Di papan itu setiap sif harus dituliskan siapa saja yang bertugas meliputi evakuasi, menghubungi unit terkait dan memadamkan api.

“Proteksi pasif meliputi tangga darurat, jalur evakuasi, dan lainnya,” bebernya.

Ia mengaku, antusiasme para karyawan rumah sakit dalam menerapkan K3 sudah cukup bagus apalagi sertifikat K3 menjadi persyaratan wajib saat kredensial atau kenaikan pangkat.

Pihak rumah sakit juga menjamin K3 bagi seluruh karyawan yang dibuktikan dengan surat komitmen.

“Direktur dan jajaran direksi rumah sakit beberapa kali ikut terjun langsung ke lapangan mengikuti *safety patrol* untuk memastikan penerapan K3 di rumah sakit,” imbuhnya.

Ia mengaku, kendala dalam memberikan edukasi K3 kepada seluruh karyawan muncul saat pandemi Covid-19 sebab ada pembatasan kegiatan berkumpul.

Pihaknya tidak dapat melakukan kegiatan simulasi selama dua tahun terakhir sehingga pembekalan K3 kurang maksimal.

Kegiatan itu mulai digalakkan kembali awal tahun ini, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Untuk menyiasatinya agar edukasi K3 terus berjalan caranya dengan memberikan edukasi di-*briefing* kecil saat pergantian sif karyawan,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya menilai, program K3 adalah sebagai investasi bagi rumah sakit. Budaya K3 yang tumbuh baik di rumah sakit menjadi kunci ekosistem di dunia kerja.

“Pegawai rumah sakit bagian dari investasi karena memiliki manfaat jangka panjang. Dengan budaya K3 yang baik tentu menekan kecelakaan kerja yang akan meningkatkan produktivitas kerja,” tegasnya.

Terapkan Budaya K3

Manajer Proyek ILO untuk Peningkatan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, Abdul Hakim mengatakan, K3 bukan lagi barang terpisah dari sistem kerja.

K3 bagian inklusif dari kebudayaan manusia dan bisa menyumbang adanya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan.

Keberadaan K3 tidak berdiri sendiri. Menurutnya, banyak orang menganggap K3 itu terpisah dan hanya seolah-olah K3 hanya berada di pabrik-pabrik besar seperti garmen, manufaktur, industri baja dan lainnya.

“K3 tidak hanya ada di industri besar tapi harus ada di semua sektor,” jelasnya dalam “Diskusi Media: Peliputan Media dan

Literasi Berita Tentang K3 di Masa Pandemi” yang diakses melalui kanal *YouTube* ILO TV, Senin (31/1/2022).

Dijelaskan, pentingnya K3 harus dijalankan semua sektor karena kematian akibat kerja menyumbang di angka antara 5 sampai 7 persen dari kematian tingkat global.

Laporan ILO menyebutkan, 7.500 pekerja meninggal setiap hari karena kondisi kerja tidak aman dan sehat.

Rinciannya, 6.500 pekerja meninggal lantaran penyakit akibat kerja, sisanya karena kecelakaan kerja.

“Kenyataan di tingkat dunia penyakit-penyakit di dunia kerja sangat banyak seperti sakit pernapasan, kanker dan sebagainya. Ternyata penyakit yang menyebabkan kematian kerja hampir terjadi di setiap negara,” beber Hakim.

Ia menjelaskan, angka kematian kerja akibat penyakit akan menjadi lebih banyak lagi ketika budaya K3 tidak dimulai dari sekarang. Untuk itu yang harus dilakukan pertama kali adalah mengembangkan budaya K3.

“Sedangkan pengembangan budaya K3 tidak bisa dibangun tanpa menerapkan K3,” terangnya.

Hal itu dapat dimulai dengan mengenali bahaya dan risikonya serta sistem manajemennya. Kemudian cara-cara mengelola bahaya mulai dari eliminasi bahaya, substitusi bahaya, pengendalian kontrol sampai penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

“Selain itu mesti tahu kebersihan, kerapian, kedisiplinan adalah bagian dari pengenalan budaya K3,” terangnya.

Ia melanjutkan, pengenalan dan penerapan K3 menjadi langkah pertama untuk membangun budaya K3. Langkah kedua dengan melakukan K3 dengan cara-cara yang baik. Setelah itu, kebiasaan baik sudah sangat diresapi baik perilaku maupun pola pikir yang akan memunculkan karakter K3.

“Kalau kita hanya kenal dan tidak menerapkan maka budaya K3 tetap jauh dari yang kita inginkan yang berimbas kecelakaan dan penyakit akibat kerja akan tetap tinggi,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sistem K3 akan tumbuh jika ada beberapa hal di antaranya komitmen manajemen puncak yang tinggi terhadap budaya pencegahan termasuk melalui alokasi sumber daya yang memadai. Sama pentingnya adalah partisipasi pekerja yang memainkan peran penting dalam mengenali dan mengidentifikasi bahaya berkontribusi pada penilaian risiko yang terinformasi dengan baik dan konteks spesifik.

“Kemudian merencanakan tindakan pencegahan yang efektif dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi,” paparnya.

Ia menambahkan, pemerintah tentu saja memegang peranan paling penting dalam melakukan pengawasan K3 yang efektif dan efisien melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penyidikan. Untuk membuat budaya K3 tumbuh, perlu didorong keinginan kuat untuk bekerja dan berbisnis lebih aman, sehat dan produktif dan menjadikannya sebagai isu nasional. Berikutnya, memasukan isu K3 dalam semua tingkat pendidikan.

“Terakhir, lebih banyak kegiatan atau tindakan nyata diperlukan untuk membuat budaya K3 menjadi kenyataan bagi semua pekerja di seluruh dunia,” paparnya.

Tanggal muat 31 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Ajo Darisman
Konde.co



Nurul Nur Azizah
Konde.co

Ajo Darisman, Sehari-hari bekerja sebagai jurnalis di Jakarta. Saban hari timbul tenggelam dalam liputan ekonomi bisnis. Belajar di Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan berdiskusi dengan Jurnalis Warkop Gintung.

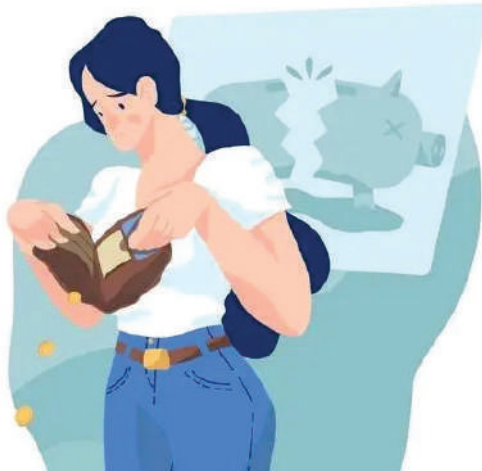
Nurul Nur Azizah, kini editor Konde.co dan Koordinator Divisi Gender, Anak dan Kelompok Marginal AJI Jakarta. Bergiat bersama Koalisi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja untuk mendorong pemerintah segera meratifikasi KILO 190 dan Rekomendasi No 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

Tulisan kami yang berjudul Kerja Serabutan: Kondisi Perempuan dan Kelompok Miskin Jakarta Di Tengah Pandemi' berupaya memotret kondisi pekerja dan kalangan buruh yang menjadi kelompok paling rentan di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Gelombang PHK, kesulitan bertahan hidup, hingga tak tersentuh berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah, dialami sebagian besar pekerja nonformal.

Mereka kerap luput dan tak terekam kamera dan tulisan jurnalis. Kompetisi Karya Jurnalistik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) ini, bisa jadi salah satu upaya memotretnya.

Kerja Serabutan: Kondisi Perempuan dan Kelompok Miskin Jakarta di Tengah Pandemi

Ajo Darisman dan Nurul Nur Azizah (Konde.co)



Menjadi *sales* lada, jadi ojek *online* mendadak, berjualan nasi dan mencari cacing untuk dijual adalah kondisi masyarakat miskin Kota Jakarta saat ini. Kerja serabutan ini dilakukan untuk mencari peruntungan baru di tengah pandemi.

Sudah nyaris setengah tahun Rino (28) melakoni kerja serabutan di pasar tradisional. Kekhawatiran akan tertular Covid-19 sudah lama ia kesampingkan.

Di benaknya, jauh lebih menakutkan bayangan akan buah hatinya yang baru berusia 1,5 tahun bakal kekurangan asupan nutrisi. Bayangan ancaman virus selalu menghantuinya kalau ia tidak bisa cukup memberikan anaknya makanan bergizi.

Warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat ini tadinya bekerja sebagai *waiter* atau pelayan restoran di salah satu hotel berbintang lima di Jakarta. Ia bersama sekitar 80 orang rekannya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebulan setelah virus corona merebak di Indonesia. Dengan sedikit pesangon yang diberikan perusahaan berupa *voucher* belanja senilai Rp 1,2 juta sebulan untuk beberapa bulan. Uang ini tentu tak cukup untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarga. Merebaknya pandemi Covid-19 membuat dia mesti meninggalkan gedung megah berpendingin ruangan itu dan kini berkeliaran di terik panas hawa pasar tradisional.

Kehidupannya di pasar diawali dengan berdagang lada Bangka. Sebuah pekerjaan yang ia dapat berkat informasi tetangga lantaran Rino aktif di Karang Taruna. Bukan perkara mudah memulai pekerjaan barunya ini terlebih berdagang sama sekali belum pernah ada dalam kamus hidupnya. Ditambah lagi dengan risiko terpapar virus karena harus bertemu dengan lebih banyak orang tiap harinya.

Keinginan buat memenuhi kebutuhan susu anaknya membuat Rino berusaha mempelajari pekerjaan baru tersebut. Setelah beberapa bulan mencoba berdagang, ia pun kemudian memutuskan mengambil tawaran untuk menjadi sales lada putih.

“Sekarang apa saja saya ambil, serabutan, *nyoba-nyoba sales* lada putih. Saya punya anak bayi baru 1,5 tahun. Kan lumayan buat susu, pampers,” cerita Rino soal alasan dia memberanikan diri keluar rumah.

Profesi barunya ini membuat Rino melakoni pekerjaan yang lebih menguras waktu dan tenaga. Bila sebelumnya hanya berdiam diri di satu pasar, kini ia harus keluar masuk pasar.

Dan setiap hari mesti bolak-balik Depok-Tanjung Priok bekerja sebagai sales lada setelah selesai berjualan di pasar

Bila dibandingkan perjuangannya sekarang dengan hasil yang didapat saat bekerja menjadi waiter memang sangat tidak sepadan. Rino bercerita, saat masih bekerja di hotel selain kondisinya lebih enak, ia pun menerima penghasilan tetap. Dengan gaji yang diterima tiap 10 hari, ia setidaknya mengantongi pendapatan Rp4,2 juta sebulan.

Sedangkan dengan menjadi sales lada putih, pendapatan maksimal bulanannya adalah Rp4 juta. Sayangnya itu pun belum pasti dan belum termasuk berbagai potongan juga untuk transportasi dan makan.

“Dari Depok ke Tanjung Priok itu ongkos sehari itu Rp40 ribu naik motor karena saya harus terjun ke pasar-pasar. *Udah gitu* gaji saya dipotong Rp250 (ribu) untuk inventaris motor. Belum dipotong utang-utang warung. Lebih dari sebulan pasti dipotong Rp300 (ribu) per bulannya. Setiap bulannya belum tetap karena banyak potongan di *sales*, entah barang hilang atau apa, *cash bon* buat bengkel kita *nanggung* 40 persen,” keluh Rino.

Penghasilan itu ia akui jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sisa gaji bersih yang ia kantong di prioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan sang buah hati dan membayar kontrakan.

Sementara untuk menambal kebutuhan sehari-hari, ia membuka usaha tambahan di rumah dengan berjualan es dan kopi. Selain risiko terpapar virus lebih besar, dia juga harus berhadapan dengan pekerjaan yang tidak mudah terutama bila bertemu dan menagih *customer* yang galaknya melebihi atasan.

Selama bekerja sebagai sales, Rino juga sempat merasakan nasib nahas dan mengalami kecelakaan. Kelelahan membuat dia sempat menabrak orang. Insiden itu membuat dia mesti membayar ganti kerugian sebesar Rp5 juta. Kantornya hanya mau menanggung setengah dari total jumlah tersebut.

Nasib tak jauh berbeda dirasakan *Nisah* (28). Perempuan asal Tangerang ini juga kehilangan pekerjaan tepat saat Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan PPKM Darurat. Kontrak kerja *Nisah* sebagai pekerja salon tak lagi diperpanjang lantaran mal dilarang buka selama aturan rem darurat ini berlaku.

Sialnya, sang suami yang bekerja sebagai sopir di sektor pariwisata juga mengalami kemalangan yang sama. Kini bahtera rumah tangga yang belum lama mereka jalani akan jauh lebih berat. Keduanya bertahan di indekos petak dengan sisa tabungan seadanya.

Sang suami kata *Nisa*, memutar otak dan sampai bekerja sebagai pencari cacing buat makanan ikan hias. Dari sana ia masih bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp50 ribu per hari buat bertahan hidup. Sementara *Nisah* mulai coba-coba menawarkan untuk salon ke rumah-rumah meski ia tahu di tengah situasi pandemi kemungkinannya jauh lebih kecil.

Mereka tak punya pilihan lain. Kembali ke tanah kelahiran di Tangerang sudah tidak mungkin semenjak kedua orangtuanya meninggal. Tak ada lagi rumah buat pulang.

“Udah enggak punya rumah, kedua orangtua udah enggak ada. Saudara sudah menikah dan tinggal dengan orang tua. Alhamdulillah suami mau ngerjain apa aja. Sekarang sambil dia nyari cacing, saya coba promosi salon ke rumah,” tutur *Nisah*.

Semenjak corona merebak, *Nisah* memang sudah bolak-balik dirumahkan. Sempat sampai 3 bulan penuh tanpa penghasilan, terimbas pengurangan gaji atau bahkan pernah cuma memperoleh upah Rp46 ribu per hari. Itu pun dengan sif kerja yang tidak setiap hari.

Beban yang dialami *Muliawati*, juga tak kalah beratnya. Perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau PRT ini sudah mesti hidup berdampingan di kontrakan petak bersama sang ibu yang terpapar Covid-19. Di rumah dua kamar yang hanya ada satu kamar mandi itu, dia tinggal bersama dua anak dan suami.

“Kami tinggal berlima dengan suami dan dua anak saya. Yang paling terasa ketika ada yang terkena Covid-19. Ketika menggunakan kamar mandi kalau ada anjuran harus pisah kamar dan kamar mandi. Ini agak susah dilakukan PRT yang tinggal di rumah petak hanya satu kamar mandi,” cerita Muliawati dalam konferensi pers “Suara Kelompok Marjinal Terhimpit Pandemi” yang digelar *Aliansi Stop Kekerasan di Dunia Kerja*, 18 Juli 2021

Usaha sampingannya berjualan nasi bakar pun terpaksa tak dilakoni. Ia takut nanti malah menularkan virus kepada tetangga. Sedang di sisi lain, pengeluaran mesti lebih banyak demi memenuhi kebutuhan multivitamin, *hand sanitizer* hingga asupan buah untuk sang ibu yang kala itu pernah terkena Covid-19.

Mulia bukan satu-satunya PRT yang kian merasakan hidup susah. Perempuan yang tergabung dalam komunitas Jala PRT ini mengungkapkan setidaknya ada 97 persen PRT yang tinggal mengontrak di rumah petak di ibu kota.

Sementara *Trade Union Right Centre* (TURC) mengungkapkan data bahwa 96 persen pekerja rumahan juga mengalami penurunan penghasilan hingga PHK sepanjang merebaknya pandemi Covid-19.

Penurunan penghasilan ini bahkan sampai ada yang kurang dari setengah dari pendapatan di hari biasa yang bisa mereka bawa pulang. Mereka yang biasanya bergaji Rp1 juta hingga Rp1,5 juta menjadi hanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulannya. Artinya ada yang hanya membawa pulang uang kurang dari Rp20 ribu per hari.

Sebanyak 5 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia menjadi tulang punggung dalam keluarga. Mereka harus memikirkan kesehatannya dan memastikan ekonomi keluarga agar tak terhenti hidupnya.

Kurang lebih dalam 10 bulan masa Covid-19, para PRT justru di-

PHK dari tempatnya bekerja. Beberapa PRT kemudian berjualan makanan untuk menyambung hidupnya. Beberapa mengurangi jatah makan keluarga dan PRT lainnya memutuskan untuk pulang kampung karena tak bisa lagi hidup dengan kondisi tak membayar kontrakan dan menyambung hidup.

Survei internal JALA PRT yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 dari bulan April sampai Agustus 2020 terhadap 539 PRT menyebutkan, sebanyak 151 PRT dirumahkan dengan pemotongan upah hingga 50 persen, 164 PRT yang selama ini bekerja secara *full time* di-PHK tanpa pesangon dan 120 PRT yang bekerja secara *part time* kehilangan sebagian pekerjaannya. Ini berarti hampir keseluruhan PRT yang disurvei kehilangan atau berkurang separuh pendapatannya selama masa Covid-19.

Jika UMP di Jakarta pada 2020 sekitar Rp4 juta, gaji PRT di Jakarta dan sekitarnya rata-rata hanya sekitar Rp 800 ribu s/d Rp1 juta. Kondisi ini jelas tidak mencukupi untuk membayar iuran baik Jaminan Keamanan Nasional (JKN) maupun Jamsostek.

Cerita lain juga datang dari Adit (27), pelapak kaus kaki di bilangan Citayam, Depok itu berkali-kali memutuskan berhadapan dengan petugas Satpol PP. Selama PPKM Darurat, lapak-lapak ini tidak diizinkan berjualan.

Adit mengaku seminggu pertama manut dan benar-benar tidak berjualan. Namun di minggu kedua dia memberanikan diri membuka lapak meski harusnya berujung ribut-ribut dan saling ngotot dengan petugas.

“Duit tinggal Rp150 ribu. Saya ikut aturan untuk tutup terus-terusan enggak ada sama sekali yang menanggung hidup saya. Lebih seram kelaparan *Bang* daripada berhadapan dengan satpol,” ungkap Adit.

Curi-curi buka lapak itu bisa sedikit menambal biaya makannya meskipun akhirnya kenekatannya itu tak bertahan lama.

Tak Tersentuh Bansos

Pemerintah berkali-kali menggaungkan berbagai bantuan sosial atau stimulus dikururkan selama kebijakan penanganan Covid-19 berjalan. Hal ini diniatkan sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok-kelompok yang terdampak langsung seperti orang-orang di atas.

Sayangnya baik Nisah, Rino, para PRT hingga Adit, tak satupun yang pernah tersentuh bansos dengan segala macam alasan yang berbeda-beda.

Selain tak ada kepastian soal kerja, PRT juga selalu terpinggirkan dari kebijakan dan program perlindungan termasuk perlindungan sosial. Mereka tidak bisa mengakses jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran atau terdaftar sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan karena mereka tak disebut sebagai pekerja. Sedangkan untuk membayar iuran jaminan sosial juga tidak memungkinkan mengingat upah PRT selama ini hanya sekitar 20-30 persen dari upah minimum provinsi (UMP).

Situasi ini semakin mengkhawatirkan selama pandemi karena PRT luput dari *social safety net policy*, tidak mendapat subsidi berkelanjutan. Dari 539 PRT tersebut, sebanyak 73 persen bekerja di Jabodetabek dan ber-KTP daerah. Semua yang ber-KTP daerah tersebut tidak juga mendapatkan subsidi berkelanjutan dalam bentuk apa pun termasuk bantuan langsung tunai (BLT). Dari yang bekerja dengan KTP DKI Jakarta, hanya 22 orang yang mendapat bansos dengan sistem *random* per RT hanya 4 orang.

Nisah berkali-kali mencoba peruntungan di Kartu Prakerja. Dia menduga tidak pernah lulus sebagai penerima lantaran Kartu Keluarga yang digunakannya masih KK orangtuanya. Kemungkinan KK ini sudah mati sejak orangtuanya tiada.

“KK baru juga belum bisa diurus karena mau ke Tangerang, Banten saja di sana masih zona merah,” jelas Nisah.

Begitu pula Rino yang mengaku tidak pernah mendapatkan program bantuan apa pun sampai saat ini. Sementara Adit, kadung pesimis sebelum mengurus, ia merasa KTP daerah membuat dia urung berharap bansos.

Padahal bantuan itu setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan mereka di tengah tidak jelasnya hidup hari-hari esok. Nisah misalnya, ia berandai-andai bila setidaknya mendapatkan bansos Rp300 ribu saja akan ia pakai buat bertahan sebulan dengan jurus sehemat mungkin yang ia bisa. Barang pertama yang teringat olehnya adalah beras. Untuk lauk dia mengaku tak akan berpikir muluk-muluk.

“Bisa dicukupkan satu bulan, paling beli beras, telur, mi instan. Kita masih berdua belum ada tanggungan. Untuk kontrakan memang enggak bisa karena Rp650 ribu sebulan.”

Di luar sana, ada banyak “Nisah” lain yang hanya bisa membayangkan bansos bisa digunakan buat apa.

Dari kelompok pekerja rumahan misalnya, peneliti TURC Indri Mahadiraka menyebutkan, setidaknya 40 persen responden dari kalangan pekerja rumahan menyatakan hingga kini tak tersentuh bansos sama sekali.

“Ada berbagai alasan. Tidak tahu informasi bagaimana mendapatkannya, tidak terdata. Ada juga yang sudah mengajukan tapi tidak mendapatkan akses, ada juga yang dianggap tidak memenuhi kriteria sampai tidak masuk daftar prioritas,” tutur Indri.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyalahkan banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses bantuan hingga fasilitas kesehatan hanya karena persoalan teknis tersebut. Padahal menurutnya, syarat administrasi seperti mesti terdata di BPJS Ketenagakerjaan tak bisa dijadikan patokan utama atau lebih dilonggarkan.

“Program BST juga harus menysar para pekerja yang terdampak

sehingga daya beli mereka bisa tetap terjaga. Pemerintah harus memastikan pekerja yang akan dibantu benar-benar pekerja yang terdampak, tidak lagi menggunakan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami dampak masa pandemi ini,” ujarnya.

“Adanya persyaratan menunjukkan KTP atau KK dalam proses vaksin tentunya akan menyulitkan para pemulung dan keluarga gerobak yang memang masih ada yang tidak memiliki KTP atau KK-nya tertinggal di kampung halaman. Demikian juga masih ada sebagian masyarakat seperti pekerja di perkebunan yang belum memiliki KTP. Seharusnya kelompok masyarakat rentan seperti ini tidak harus menunjukkan KTP atau KK sebagai syarat untuk divaksinasi. Namun tetap dicatat dan difoto sebagai bukti pendataan pernah divaksinasi,” sambung pengamat ketenagakerjaan itu.

Kondisi ini membuktikan bahwa kelompok miskin Kota Jakarta bekerja dalam kondisi terjepit yakni sebagai pekerja prekariat (serabutan) yang tak diakui sebagai pekerja oleh pemerintah dan kondisi yang makin memburuk di masa pandemi.

Tanggal muat 1 November 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Dhana Kencana dan Tim
IDNTimes.com

Saya Dhana Kencana, jurnalis IDN Times. Saya bekerja sebagai jurnalis sudah lebih dari 10 tahun. Meskipun berkecukupan pada editorial harian, beberapa liputan saya berfokus pada isu-isu lingkungan, sains, energi, dan ekonomi bisnis. Sejumlah penghargaan dan grant, juga fellowship sudah pernah saya terima. Seperti Penghargaan Subroto Awards, Anugerah PFI, Pulitzer Center, dan Visual Climate.

Kesan dan pesan kompetisi ini cukup menantang bagi jurnalistik, untuk menghadirkan tema dan isu yang kompleks mengenai kesehatan mental, yang masih perlu dan terus didengarkan kepada masyarakat.

Kesehatan Mental: Vital dan Fatal Bikin Bebal Saat Pandemi Covid-19

Dhana Kencana dan tim (IDNTimes.com)

Awas! Perempuan dan milenial paling rentan mengalaminya. Kesehatan mental kerap diabaikan dalam proses penanganan Covid-19, bagi mereka yang terpapar atau tidak. Mereka yang terdampak kian banyak. Penyedia untuk layanan tersebut masih terbatas apalagi belum menjadi prioritas pemerintah.

Batuk dan napas yang terengah-engah masih dialami Alin meskipun telah dinyatakan negatif Covid-19 pada 1,5 bulan lalu. Ya perempuan 37 tahun tersebut merupakan penyintas virus corona setelah sebelumnya bergulat melawan keganasan virus corona selama 35 hari sejak terinfeksi pada 7 Februari 2021 lalu. Gejala-gejala yang mirip pada seseorang yang terpapar Covid-19, badan nyeri dan meriang sesekali ia rasakan lagi bahkan bertambah. Di antaranya penyakit hipertensi yang sebelumnya tidak pernah ia idap dan berubahnya siklus menstruasi yang kini cuma dua bulan sekali.

“Kondisi badan memang sudah enakan. Cuma setelah kena Covid-19 rasanya jadi sering kelelahan terus gula darah dan tensi masih suka tinggi. Padahal aktivitas masih banyak dari rumah dengan protokol ketat. Keluhan lain sensasi dada dingin dan berdebar terasa seperti asam lambung naik,” kata pemilik nama lengkap Aning Karindra itu kepada *IDN Times* saat dihubungi melalui telepon pada Sabtu (3/7/2021).

Gangguan Mental Memengaruhi Kesehatan Fisik

Dari hasil pemeriksaan dokter umum, dokter saraf, dokter paru dan dokter penyakit dalam, Alin divonis mengidap *Long Covid-19* yang sering dianggap sebagai gejala atau keluhan pasien yang timbul sesudah fase virus corona selesai. Rupanya tidak berhenti di situ, kesehatan mental ibu dua anak itu juga terganggu dengan perasaan cemas dan panik terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi.

“Benar-benar efek Covid-19 ini telah menurunkan kualitas hidup saya. Apalagi, saya termasuk orang yang sangat parno (paranoid) dan mudah cemas. Bagi orang yang melihat dan belum pernah merasakan pasti akan bilang *lebay* atau malas. Padahal, keluhan itu nyata saya rasakan,” ujarnya yang berprofesi sebagai jurnalis di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Hal serupa juga terjadi pada diri Ilham, penyintas asal Palembang, Sumatera Selatan. Adakalanya ia stres dan *overthinking* terhadap stigmatisasi serta perlakuan kepada penyintas Covid-19 yang selalu dianggap sebagai aib masyarakat.

“Pernah disudutkan teman sebaya dan beberapa tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ada yang masih takut dan sedikit menjaga jarak. Memang butuh waktu cukup panjang untuk kembali sehat (secara fisik dan mental) seperti semula,” tutur pria yang akrab dipanggil Lam itu.

Tingginya Kasus Virus Corona Menjadi Pemicu Orang Menjadi Paranoid

Kecemasan berlebihan yang berujung pada paranoid seperti yang dialami Alin dan Lam kerap dijumpai Probowatie Tjondronegoro. Ia yang saban hari bekerja di Klinik Psikolog RS Santo Elisabeth Semarang itu menyebut bukan perkara yang gampang memberikan terapi mental bagi pasien Covid-19. Baik itu dari kalangan pengusaha, aparat sipil negara (ASN) atau ibu rumah tangga.

Tingginya kasus Covid-19 di Kota Semarang akhir-akhir ini menjadi penyebab kian banyaknya orang yang paranoid. Tidak kurang ada 2-3 pasien per hari bahkan 10 orang setiap minggunya yang harus menjalani terapi mental akibat pandemi Covid-19.

“Awalnya datang dan bilang resah karena situasinya semakin enggak menentu sehingga emosinya jadi susah dikontrol. Rata-rata yang saya tangani emosinya sedang labil. Perlu ketelatenan dan kesabaran ekstra mengingat pasien kerap menutup diri dan terkesan malu karena virus corona yang diidapnya. Pernah juga saya kasih resep khusus menenangkan diri supaya enggak gampang panik menghadapi situasi di sekitar rumah,” kata perempuan berusia 54 tahun yang kini membuka konsultasi terapi psikis secara *online* dan *by phone* kepada *IDN Times*, Sabtu (3/7/2021).

Kehadiran teman-teman sepenanggungan dibutuhkan bagi para penyintas yang belum tuntas melawan efek Covid-19. Komunitas swabantu Covid Survivor Indonesia (CSI) hadir bak mata air bagi mereka yang menyimpan kecemasan berupa keluhan dan gejala *Long Covid-19*. Para penyintas berbagi melalui media sosial seperti *Facebook Group*, *Instagram*, dan *Telegram*, sehingga tidak merasa sendiri.

Manfaat CSI sebagai sarana edukasi dan advokasi bagi masyarakat khususnya para penyintas virus corona dirasakan betul oleh Alin. Anggota mereka kini mencapai lebih dari 2.400 penyintas.

“Kami ingin menampung keluhan para penyintas terutama yang mengalami *Long Covid-19*. Sebab ini fenomena baru dan saya tidak mau ada yang merasa sendiri saat mengalami keluhan atau gejala setelah sembuh dari virus corona ini. Apalagi, terkait masalah stigma yang mereka alami,” kata pendiri CSI, Juno Simorangkir.

Pemerintah Kurang Serius dalam Penanganan Kesehatan Mental

Penanganan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik dan mental pasien Covid-19 menjadi hal utama. Gangguan kesehatan mental dapat memperparah risiko penyakit dan kematian. Sayangnya, persoalan kesehatan mental belum menjadi prioritas di Indonesia meski kasusnya tinggi.

Sebagai contoh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) yang belum menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius.

“Kondisi (gangguan kesehatan mental) ini serius. Banyak nakes (tenaga kesehatan) stres, depresi apalagi sekarang rawan. Sangat perlu dukungan dan saya usul TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) di Jabar digerakkan lagi. Semua orang fokus pada kesehatan Covid-19 fisik tapi mental kurang diperhatikan. Jika mental sudah terganggu, imunitas akan menurun dan mudah terpapar,” kata Dokter Spesialis Kejiwaan RS Melinda 2 di Kota Bandung, Teddy Hidayat.

Psikolog yang juga Direktur Biro Psikologi Minauli Consulting Irna Minauli melihat upaya pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara masih kurang serius terhadap masalah kesehatan mental bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 atau tidak.

Berbeda dengan Jabar dan Sumut, Pemda di Kalimantan Timur (Kaltim) sadar akan ketidakmampuannya menyediakan layanan gangguan kesehatan mental secara layak. Bersama Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi) Balikpapan, layanan konseling *online* kesehatan mental bagi masyarakat umum dibuka setiap hari dan gratis. Mulai pukul 08.00-21.00 WITA melalui saluran telepon 119 ekstensi 8.

“Pengguna dapat memanfaatkan layanan konseling bersama psikolog-psikolog setempat. Mereka yang terganggu kesehatan mentalnya diajak membangun harapan dan membangkitkan semangat juang karena mereka harus kuat berjuang serta

memberikan dukungan kepada lingkungan juga. Kami sering mengajak mereka mengambil sisi positif dari apa yang dialami lalu melakukan psikoedukasi untuk menerima diri,” kata Ketua Himpsi Balikpapan Dwita Salverry.

Perempuan dan Milenial Rentan Alami Gangguan Kesehatan Mental

Perempuan dalam survei soal kesehatan mental melalui swaperiksa yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) secara daring per Agustus 2020 menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan mental di Tanah Air. Jumlahnya mencapai 71 persen dari total sebanyak 4.010 pengguna swaperiksa. Sisanya adalah laki-laki.

PDSKJI menyebut ada empat faktor yang memengaruhi terganggunya kesehatan mental seseorang akibat pandemi Covid-19 yaitu isolasi dan *social distancing*, tekanan ekonomi, stres dan depresi serta stigma dan diskriminasi,

Adapun jenis gangguan kesehatan mental yang paling sering dialami adalah trauma, cemas, depresi dan ingin mati. Yang paling mencengangkan, mereka yang berpikiran untuk mati atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apa pun paling banyak berusia 18-29 tahun.

Gejala cemas paling banyak dialami para pengguna swaperiksa PDSKJI. Sebagian besar adalah merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah dan sulit rileks.

Kemudian disusul gejala depresi seperti gangguan tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga dan kehilangan minat. Selain itu, gejala stres pascatrauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan yang berhubungan dengan virus corona juga banyak dialami para swaperiksa. Mereka di antaranya merasa berjarak dan terpisah dari orang lain dan merasa terus waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga.

Dalam satu bulan terakhir, masyarakat di Tabanan Bali yang mengalami gangguan kesehatan mental meningkat seiring bertambahnya kasus Covid-19. Sebagian besar dari mereka mengalami cemas bukan lantaran terinfeksi virus corona tetapi dampak dari berita hoaks mengenai Covid-19 dan vaksinasi. Rentang usia mereka 40-60 tahun.

“Saat ini (di Bali) dalam sebulan ada sekitar 15 kasus baru gangguan cemas atau meningkat sekitar 10--20 persen dari waktu sebelum pandemi. Baik itu di rumah sakit milik pemerintah atau swasta. Mereka sudah membawa bakat cemas dalam diri, ditambah sering membaca berita hoaks dan akhirnya memperburuk kondisinya,” ujar Dokter Spesialis Kejiwaan di RSUD Tabanan, dr.I Gusti Ngurah Bagus Mahayasa saat dihubungi, Jumat (2/7/2021).

Kesehatan Mental dan Fisik Berperan Utama

Spesialis Kedokteran Jiwa (Psikiater) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dr Drajat Wicaksono menyebut bahwa kesehatan mental pada dasarnya sama pentingnya dengan kesehatan fisik terlebih pada masa pandemi Covid-19.

Belakangan banyak masyarakat yang khawatir atau ketakutan berlebihan seperti takut tertular hingga depresi akut setelah dinyatakan positif virus corona. Kekhawatiran berlebihan tersebut dapat berujung pada tindakan-tindakan nekat.

Drajat mengakui meskipun tidak banyak, ada beberapa pasien Covid-19 atau keluarga yang sedang ditangani dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) sengaja meminta PDSKJI baik psikolog atau psikiater untuk membantu pendampingan dalam proses pemulihan (*recovery*) kesehatan mental mereka. Selain psikoterapi, jika diperlukan mereka bisa mendapatkan obat (medikamentosa).

Di luar itu, PDSKJI menyediakan layanan *hotline* yang bisa dihubungi masyarakat secara umum yang memerlukan

pendampingan soal gangguan kesehatan mental dari ringan sampai yang berat.

“Persoalan Covid-19 rupanya berdampak kepada masyarakat secara luas baik yang terpapar maupun tidak. Pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan mental. Kita juga pernah dengar ada pasien yang lari (kabur) bahkan lompat (terjun) dari tempatnya dirawat,” ucap Drajat yang juga pengurus di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan, Kaltim.

Tak lupa ia menyarankan bagi mereka yang sudah dinyatakan depresi, selain menjalani terapi antidepresan bisa mengikuti psikoterapi dan memperkuat daya tahan stres. Caranya dengan berolahraga, tidak panik serta tidak boleh membaca pemberitaan soal Covid-19 apalagi hoaks atau berita bohong.

Pandemi COVID-19 Memicu Perselingkuhan

Permasalahan kesehatan mental semakin berkembang tidak lagi berkuat pada persoalan virus corona semata. Dampak yang ditimbulkan kian meluas dan bersinggungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

“Keluhan yang rata-rata masuk ke saya seperti banyaknya yang tidak memiliki pekerjaan. Itu membuat mereka menjadi pusing, cemas, dan cepat marah. Selain itu apa yang mereka usahakan tidak kunjung memenuhi ekspektasi,” tutur Psikolog Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, Retno Riani.

Masalah lain yang muncul adalah banyaknya para orangtua yang mengkhawatirkan kesehatan mental anak mereka lantaran kurangnya interaksi baik di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun sekolah. Hal tersebut tidak lain imbas dari kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Anak-anak jadi kurang bergaul dan lebih terfokus kepada gadget-nya masing-masing, lebih-lebih mereka mengakses hal-hal yang belum sepatutnya dilihat, dikarenakan kebebasan dalam mengakses *smartphone*,” imbuhnya.

Kesehatan mental juga mengguncang hubungan personal pasangan suami istri. Tidak sedikit kasus atau keluhan kepada dirinya ihwal perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19. Tingginya intensitas bertemu dan kurangnya komunikasi memicu terjadinya *affair*.

“Sering main *smartphone* dan mengakses media sosial hingga akhirnya kopi darat. Ini karena kejenuhan kedua pasangan akibat WFH (*Work From Home*). Harusnya pada situasi saat ini setiap pasangan lebih *prepare* dan mendekatkan diri dengan keluarga. Setiap yang diawali dengan kecemasan akan berakibat buruk ke depannya. Masing-masing individu bisa segera mengonsultasikan kepada penyedia layanan kesehatan, apalagi sudah mulai merasakan indikasi gangguan mental,” kata Psikolog UIN Raden Intan Lampung itu.

Menjadi Teman Penting dalam Penanganan Kesehatan Mental

Relawan Pendamping Keluarga Pasien Covid-19 Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) mengambil peran dengan mendampingi para pasien dapat sembuh lahir dan batin. Masalah utama dan pertama yang ditangani para relawan adalah psikologis pasien.

Guncangan yang dialami mereka cukup berat karena berbagai macam faktor. Para relawan tersebut menjadi teman bagi pasien-pasien sebagai tempat berbagi cerita, curhat dan berkeluh kesah.

“Tim dokter di RSLI memang memiliki spesialis kejiwaan. Tetapi satu orang dokter itu dirasa kewalahan jika menangani ratusan pasien Covid-19. Apalagi yang mereka butuhkan bukan hanya pengobatan tapi juga pendampingan. Pernah ada yang menyendiri terus kami dekati ternyata keluarganya ada yang meninggal. Ada yang *ngomong* sama pohon kita dekati ternyata istrinya meninggal,” kata Ketua Pelaksana Relawan Pendamping Keluarga Pasien Covid-19 RSLI, Radian Jadid.

Guncangan-guncangan yang dialami para pasien umumnya disebabkan tiga hal. Pertama adalah ketakutan terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Sebagian besar dari mereka takut akan stigmatisasi pasien Covid-19. Malah tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa virus corona bisa menular sekali pun telah sembuh.

Kedua adalah persoalan ekonomi para pasien yang menjadi tulang punggung keluarga. Ketika dirawat, mereka berpikiran keluarga tak memiliki pemasukan lain. Radian bersama timnya yang beranggotakan 27 relawan juga berusaha membantu dari sisi ekonomi pasien dengan cara menghubungkan donatur-donatur yang bisa memberikan bantuan.

Yang terakhir, relawan berusaha mengadvokasi serta mengedukasi perusahaan-perusahaan yang tidak mau menerima bahkan memecat para pasien yang terpapar Covid-19.

Pendampingan yang dilakukan para relawan tersebut tak berhenti di tenda perawatan. Saat pasien “lulus” dan menjadi “alumni” RSLI, para relawan masih setia menemani hingga isolasi mandiri usai. Pada masa-masa itu, para relawan menjelaskan ke lingkungan masyarakat apabila pasien yang bersangkutan telah sembuh dari Covid-19 karena menuntaskan masa karantina dan tidak bergejala.

“Kami juga buat surat keterangan sembuh supaya warga percaya. Karena kalau hasil *swab* PCR (*Polymerase Chain Reaction*) itu masih positif, mungkin ada puing-puing virus yang terdeteksi. Tapi kan CT (*Cycle Treshold*) *value*-nya sudah tinggi sekali dan menurut Kementerian Kesehatan sudah bisa dinyatakan sembuh,” tutur Radian.

BPJS Kesehatan Cover Gangguan Kesehatan Mental

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program JKN-KIS memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental. Melansir laman

resmi mereka, bagi yang terbelit persoalan gangguan mental bisa mendatangi fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, yakni puskesmas atau klinik setempat.

Apabila kasus gangguan kesehatan mental yang dialami tidak mampu diatasi di faskes pertama tersebut, dokter akan memberikan rujukan ke rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa yang memiliki kompetensi kejiwaan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program JKN-KIS untuk gangguan kesehatan mental juga dapat digunakan di seluruh rumah sakit jiwa di Indonesia. Bahkan bisa didatangi meski dalam kondisi saat pemberlakuan PPKM Darurat. Adapun secara umum pelayanan medis yang dibutuhkan penderita gangguan mental seperti skizofrenia dapat dilayani di faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan itu tidak terbatas untuk penyakit skizofrenia saja tetapi juga masalah kesehatan mental lainnya seperti gangguan *personality*, *control impulse*, gangguan bipolar bahkan depresi. BPJS Kesehatan juga menjamin tindakan psikoterapi dan prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa.

Tanggal muat 5 Juli 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)



**KATEGORI
FOTO**



Simon Dodit Yogo Pitoyo
SUARA MERDEKA

Saya mendukung adanya lomba atau kompetisi semacam ini. Untuk menambah semangat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas karya Jurnalistik.

Penyambungan Kabel Jaringan SUTET

Simon Dodit Yogo Pitoyo (SUARA MERDEKA)



Pekerja di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) menyambungkan jaringan kabel transmisi PLN di Candirejo, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/2/2021). SUTET 500 Kilovolt mengalirkan listrik dari sejumlah pembangkit yang melintasi Jawa-Bali.

Tanggal muat 19 Februari 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Prima Mulia

Agence France-Presse (AFP)

Saya kontributor foto untuk kantor berita Prancis dengan lingkup kerja di wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat. Selain isu-isu nasional, peristiwa internasional yang melibatkan tokoh-tokoh negara asing atau olahraga juga wajib di liput, termasuk isu-isu regional terkait lingkungan, HAM, hukum, dan politik. Saat ini, sejak 2020 sampai 2022, pandemi jadi isu yang terus dipantau dan diliput.

Adanya kompetisi jurnalistik dengan tema pekerja dan keselamatan kerja di masa pandemi, saya pikir ini jadi kesempatan lain (dalam bentuk pameran foto atau buku) untuk memberi gambaran gamblang betapa para pekerja lapangan di masa pandemi setiap harinya bergelut dengan resiko terpapar Covid-19 dengan potensi sangat tinggi. Buku ini bisa lebih jauh menyuarakan perjuangan mereka-mereka yang ada di garda terdepan, namun kerap dicibir dengan tuduhan-tuduhan yang tak relevan, misalnya seperti para pemikul peti jenazah Covid-19.

Meregangkan Tubuh Sejenak

Prima Mulia (AFP)



Petugas pemakaman dengan APD kelelahan hingga meregangkan tubuh di sela proses penguburan jenazah Covid-19 yang berlangsung 24 jam di tempat pemakaman khusus Covid-19 di Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/6/2021). Selama Juni-Juli 2021, Indonesia mengalami puncak penularan dan kematian gelombang ke-2 Covid-19 varian Delta.

Tanggal muat 15 Juni 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Aji Hendro
GoDepok

Melakukan Peliputan atau peristiwa yang ada di Kota Depok dan sekitarnya, terkait kompetisi anugerah jurnalistik dinilai luar biasa dan diharapkan bisa dilakukan setiap tahun, serta mendukung adanya penerbitan buku dari kompetisi anugerah Jurnalistik Aji dan ILO.

Penyemprotan Disinfektan

Aji Hendro (GoDepok)



Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Jawa Barat, yang memakai APD lengkap melakukan penyemprotan cairan disinfektan dengan menggunakan mesin *fogger* di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Margonda pada Sabtu (22/8/2020).

Tanggal muat 23 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Arie Basuki
MERDEKA.com

Saat ini bekerja sebagai fotografer di Merdeka.com

Bekerja dengan Prokes Ketat

Arie Basuki (MERDEKA.com)



Pekerja melakukan pemeliharaan tanaman sayuran di pertanian *vertical farming* di sebuah gudang milik Sentra Farm, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/01/2022).

Tanggal muat 18 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Anis Efizudin
ANTARA FOTO

Saya pewarta foto di LKBN Antara sejak tahun 2006 yang bekerja di wilayah eks Karesidenan Kedu yang meliputi Kabupaten, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen. Selain aktif sebagai pewarta foto saya juga sering mengisi pelatihan foto jurnalistik di berbagai instansi pemerintahan, sekolah dan organisasi kemasyarakatan. Saya menyukai liputan tentang seni budaya, pendidikan, lingkungan hidup dan dunia anak-anak. Saya juga pernah mendapat berbagai macam prestasi dan penghargaan di bidang fotografi.

Dan saya mengapresiasi dan sangat mendukung program kompetisi jurnalistik AJI di bidang ketenagakerjaan sebagai salah satu sarana memperjuangkan hak pekerja sekaligus sebagai wujud kepedulian insan media terhadap kaum nasib buruh.

Pemeliharaan BTS Gunung Sumbing

Anis Efizudin (ANTARA FOTO)



Teknisi melakukan pemeliharaan perangkat Base Transceiver Station (BTS) di kawasan wisata Nepal van Java lereng Gunung Sumbing di Dusun Marongan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, Senin (7/6/2021). Untuk mendukung program pemerintah memulihkan pariwisata dan perekonomian daerah masa pandemi Covid-19, kualitas jaringan seluler harus terjaga.

Tanggal muat 7 Juni 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Aristono Edi Kiswanto
PONTIANAK POST

Saya senang membaca apapun sejak kecil. Kemudian lewat membaca jadi suka menulis hingga kini bekerja sebagai jurnalis di Harian Pontianak Post. Merasa suka tantangan dan jarang stres, karena moto hidup saya; “Bukan nanti bagaimana, tapi bagaimana nanti”.

Kompetisi ini sangat baik karena bisa membuka lebar perspektif tentang K3 di era pandemi, hubungan korporasi dan buruh serta fenomena digitalisasi instan di segala bidang.

Mawas Diri di Tengah Pandemi Wajib Protokol Kesehatan

Aristono Edi Kiswantoro (PONTIANAK POST)



Para buruh perempuan mengenakan masker di Pabrik Karet Hok Tong, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (30/4/2021) untuk menyortir potongan karet mentah. Perlengkapan *safety* seperti penutup telinga wajib dikenakan bagi mereka yang bekerja di area mesin.

Tanggal muat 4 Januari 2022

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Dery Ridwansah
JAWAPOS.com

Menjadi Jurnalis foto sejak tahun 2014. Pernah memenangi Juara 1 Lomba Foto Rally “Explore Kota Tangerang”. Kesan untuk kompetisi ini terus maju di tahun-tahun selanjutnya agar terus terciptanya karya-karya jurnalistik yang menginformasikan pesan ke masyarakat.

Pekerja Konstruksi Jakarta International Stadium

Dery Ridwansah (JAWAPOS.com)



Aktivitas pekerja pembangunan gedung Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Rabu (7/4/2021). Kementerian Ketenagakerjaan menyebut kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Direktorat K3 Kemnaker, terjadi 155.327 kasus kecelakaan kerja pada 2019 dan 153.055 kasus 2020.

Tanggal muat 5 September 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Ferganata Indra Riatmoko
KOMPAS

Saya mulai bergabung di Harian Kompas pada tahun 2007 sebagai Pewarta Foto dan sempat bertugas di Jakarta dan Bandung. Pada pertengahan tahun 2008 mulai bertugas sebagai pewarta foto untuk kawasan DI Yogyakarta hingga saat ini. Selain meliput ke berbagai daerah pada beragam peristiwa dan ekspedisi baik darat maupun dalam air, beberapa kali juga sempat mendapat penugasan peliputan ke beberapa negara asing.

Penghargaan yang pernah diraih antara lain Silver medal pada WAN-IFRA tingkat Asia.

Kompetisi ini mendorong saya untuk membuat karya yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Uji Kompetensi Mengelas

Ferganata Indra Riatmoko (KOMPAS)



Peserta uji kompetensi menggunakan pelindung muka dan mata saat mengelas besi di tempat uji kompetensi Fakultas Teknik Mesin UNY, Karangmalang, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (17/6/2021). Pelindung wajib digunakan oleh teknisi las untuk melindungi mata dari paparan cahaya berlebih saat mengelas. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menggelar uji kompetensi mengelas bagi peserta program pelatihan balai latihan kerja (BLK). Sertifikat kompetensi sebagai bukti kredibilitas daya saing di dunia kerja.

Tanggal muat 16 Juli 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Maman Sukirman
SINDONEWS.com

Saya Maman Sukirman berkerja di Koran Sindo Makassar sebagai fotografer sejak 2007 hingga sekarang. Kompetisi “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Masa Pandemi COVID-19” sangat memberi semangat bagi saya sebagai pewarta foto untuk tetap berkarya di tengah pandemi.

Benahi Fasilitas Kelistrikan di Mamuju, Petugas PLN Prioritaskan Keselamatan

Maman Sukirman (SINDONEWS.com)



Pekerja PLN memperbaiki jaringan listrik di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2021). Fasilitas kelistrikan di daerah ini rusak setelah diguncang gempa berkekuatan 6,2 SR. Petugas tak hanya gunakan pelindung seperti helm namun juga masker untuk mencegah infeksi Covid-19. Pandemi diketahui berdampak terhadap pasar tenaga kerja dan dunia usaha. ILO memperkirakan jumlah pekerja dan keluarga terdampak pandemi akan tetap tinggi sampai paruh pertama Tahun 2022.

Tanggal muat 15 November 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)





Oky Lukmansyah
ANTARA FOTO

Fotografer Antara Foto Jurnalis wilayah Tegal, Slawi, Brebes dan Pemasang. Pernah menjuarai beberapa lomba foto nasional dan menjadi juri lomba foto di beberapa event.

Lomba ini sangat mendukung sekali tentang keselamatan dan kesehatan pekerja di Indonesia, semoga dari lomba ini keselamatan dan kesehatan pekerja benar benar sangat diperhatikan.

Produksi Sapu Ekspor

Okky Lukmansyah (ANTARA FOTO)



Sejumlah pekerja mengenakan masker menyelesaikan pembuatan sapu sorgum di Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (9/3/2021). Sapu berbahan dasar merang gandum (sorgum) dan lidi diekspor ke Jepang, China, dan Taiwan dijual seharga Rp20 ribu hingga Rp80 ribu per satuan tergantung bentuk dan ukuran.

Tanggal muat 9 Maret 2021

Artikel asli dapat di baca [disini](#)



Tentang Proyek Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja

Mayoritas pekerja dan anggota keluarganya mengandalkan pemasukan tunggal dari satu pekerjaan untuk penghidupan dan kesejahteraan mereka. Mengurangi risiko infeksi di tempat kerja sebaik mungkin menjadi hal sangat penting.

Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan tindakan pencegahan COVID-19 serta keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui tempat kerja. Proyek ini akan menilai risiko penularan COVID-19 di 1.500 tempat kerja dan memberikan saran untuk mengurangi risiko. Proyek ini juga memperkuat kapasitas pemangku kepentingan untuk menanggapi pandemi COVID-19 saat ini dan krisis kesehatan masyarakat di masa depan, dan untuk mengatasi tantangan K3 lainnya.

Proyek dilaksanakan dalam kerangka unggulan ILO Safety + Health for All yang berfokus pada 4 bidang strategis: membangun pengetahuan, memperkuat kapasitas nasional, menciptakan kerangka kerja nasional yang kondusif dan mendorong permintaan akan tempat kerja yang aman dan sehat.

Atas Kerja Sama

